

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN
2023

Kantor Wilayah
Kementrian Hukum dan
Hak Asasi Manusia

SUMATERA BARAT

KATA PENGANTAR

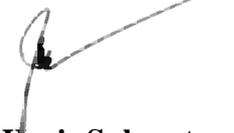
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka pelaksanaan good governance, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat telah merumuskan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenkumham No. 31 tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sesuai dinamika perkembangan yang terjadi, Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2024 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan Kinerja ini merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Diharapkan dengan terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini dapat dijadikan media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja dan menjadi bahan evaluasi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

Padang, 10 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah



Haris Sukamto

NIP. 19660605 198911 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Dari utara ke selatan, provinsi dengan wilayah seluas 42.012,89 km² ini berbatasan dengan empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu. Sumatera Barat adalah rumah bagi etnis Minangkabau, walaupun wilayah adat Minangkabau sendiri lebih luas dari wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat saat ini. Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dengan pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di seluruh kabupaten (kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai) dinamakan sebagai nagari.

Sebagai organisasi pemerintah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat berperan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Sumatera Barat. Ini merupakan bentuk tugas dan fungsinya dalam melaksanakan rencana program dan kegiatan kerja yang mengacu pada rencana pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam Perpres RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN. Salah satu program prioritas pembangunan yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dengan sasaran strategis yaitu : Peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan; peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum; peningkatan, penghormatan, pemajuan dan penegakan Hak Asasi Manusia; peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN); peningkatan kualitas pelayanan publik; peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; dan pementapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya berupa anggaran dan SDM, maka sasaran yang ingin di capai pada tahun 2023 ditetapkan dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Dokumen tersebut sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat Tahun 2023.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. LATAR BELAKANG	5
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	6
C. MAKSUD DAN TUJUAN	9
D. ASPEK STRATEGIS	9
E. ISU STRATEGIS.....	11
F. SISTEMATIKA LAPORAN	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. RENCANA STRATEGIS.....	13
B. PERJANJIAN KINERJA.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	25
B. REALISASI ANGGARAN	85
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	85
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	90
BAB IV PENUTUP	99
A. KESIMPULAN.....	99
B. SARAN.....	99

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat merupakan penyelenggara roda pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat mewakili Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraannya selalu menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, sinergi, transparansi dan inovatif serta senantiasa melakukan penegakan hukum. Selain itu, adanya komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah yang bersih, bebas korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) serta memberikan pelayanan publik yang prima. Dari perwujudan nilai-nilai tersebut berkorelasi positif dengan visi misi dan tujuan organisasi, serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Sementara saat ini, perkembangan masyarakat yang semakin kritis terutama dengan kebijakan pemerintah yang menyangkut hajat orang banyak diantaranya; isu-isu Hak Asasi Manusia, good governance, penegakan hukum, pelayanan publik dan lain sebagainya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagai perpanjangan tangan Pemerintah sewajarnya dapat mewujudkan visi agar masyarakat memperoleh kapastian hukum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dituntut menyesuaikan arah dan gerak reformasi serta transformasi global. Selain itu, Kantor Wilayah juga berkewajiban melakukan respon positif dan mampu memberikan solusi terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mempunyai peran dan andil besar dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai akuntabilitas instansi Pemerintah yang baik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Pusat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

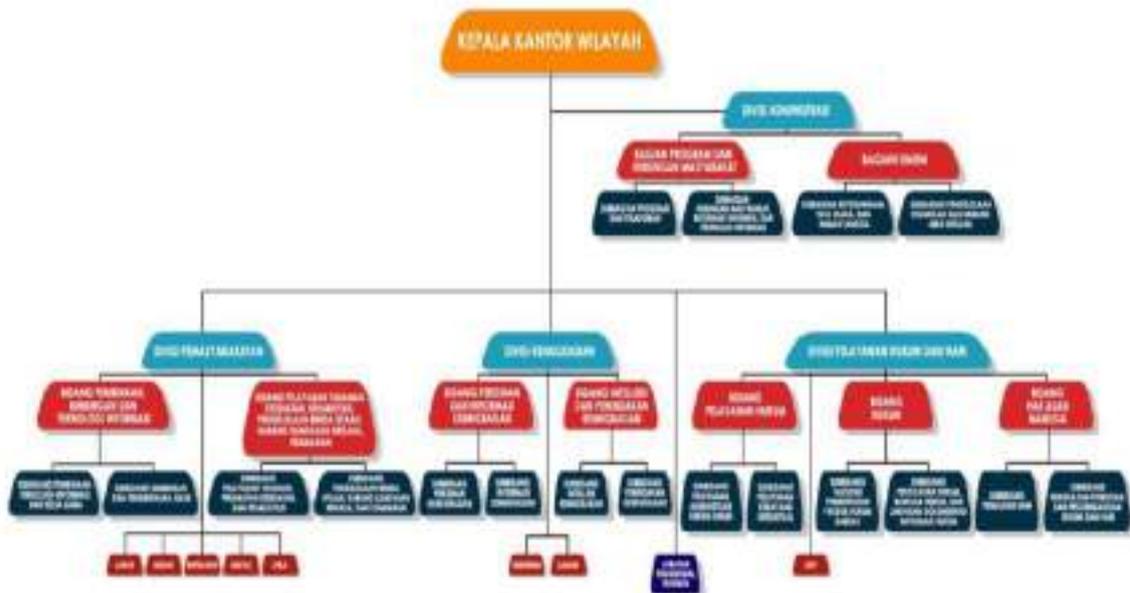
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi Sumatera Barat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat terletak di Jalan S. Parman No. 256 Padang. Kepala Kantor Wilayah dibantu oleh para Kepala Divisi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor : 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dengan struktur organisasi terdiri dari 4 (empat) Divisi :

1. Divisi Administrasi, yang mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan pembinaan teknis di wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

2. Divisi Pemasyarakatan, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Pemasyarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
3. Divisi Keimigrasian, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Keimigrasian berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.
4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat membawahi sebanyak 28 (dua puluh delapan) Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 15 (enam belas) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), 8 (tujuh) Rumah Tahanan (RUTAN), 2 (dua) Balai Pemasyarakatan (BAPAS), 1 (satu) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dan 2 (dua) Kantor Imigrasi (KANIM).

REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI SUMATERA BARAT KEMENTERIAN

NO	NAMA SATUAN KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	SUMATERA BARAT - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT	93	91	184
2	SUMATERA BARAT - LAPAS KELAS IIA PADANG	101	22	123
3	SUMATERA BARAT - LAPAS KELAS IIA BUKITTINGGI	73	9	82
4	SUMATERA BARAT - LAPAS KELAS IIB SOLOK	68	17	85
5	SUMATERA BARAT - LAPAS KELAS IIB PARIAMAN	71	9	80
6	SUMATERA BARAT - LAPAS KELAS IIB MUARA SIJUNJUNG	50	6	56
7	SUMATERA BARAT - LAPAS KELAS IIB PAYAKUMBUH	52	11	63
8	SUMATERA BARAT - LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II TANJUNG PATI	41	12	53
9	SUMATERA BARAT - LAPAS TERBUKA KELAS IIB PASAMAN	41	2	43
10	SUMATERA BARAT - RUTAN KELAS IIB PAINAN	31	6	37
11	SUMATERA BARAT - RUTAN KELAS IIB PADANG PANJANG	37	4	41
12	SUMATERA BARAT - RUTAN KELAS IIB BATUSANGKAR	27	5	32
13	SUMATERA BARAT - RUTAN KELAS IIB LUBUK SIKAPING	40	8	48
14	SUMATERA BARAT - RUTAN KELAS IIB SAWAHLUNTO	26	4	30
15	SUMATERA BARAT - BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PADANG	46	28	74
16	SUMATERA BARAT - BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BUKIT TINGGI	28	17	45
17	SUMATERA BARAT - RUPBASAN KELAS I PADANG	18	0	18
18	SUMATERA BARAT - KANIM KELAS I TPI PADANG	43	27	70
19	SUMATERA BARAT - KANIM KELAS II NON TPI AGAM	26	15	41
20	SUMATERA BARAT - LAPAS KELAS IIB LUBUK BASUNG	36	8	44
21	SUMATERA BARAT - RUTAN KELAS IIB PADANG	62	14	76
22	SUMATERA BARAT - LAPAS KELAS III DHARMASRAYA	48	5	53
23	SUMATERA BARAT - LAPAS NARKOTIKA KELAS III SAWAHLUNTO	61	6	67
24	SUMATERA BARAT - LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB PADANG	22	33	55
25	SUMATERA BARAT - LAPAS KELAS III ALAHAN PANJANG	22	4	26
26	SUMATERA BARAT - LAPAS KELAS III SULIKI	27	6	33
27	SUMATERA BARAT - LAPAS KELAS III TALU	29	3	32
28	SUMATERA BARAT - RUTAN KELAS IIB MANINJAU	25	0	25
29	SUMATERA BARAT - RUTAN KELAS IIB MUARA LABUH	23	4	27
TOTAL		1267	376	1643

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik merupakan Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem pengendalian gambaran kinerja instansi untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dapat dipenuhi melalui pelaksanaan strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini adalah untuk melaporkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dalam pencapaian target kinerja tahun 2023 Adapun tujuannya adalah untuk :

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dalam mewujudkan visi dan misi sebagai good governance;
2. LKjIP sebagai perwujudan akuntabilitas Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat kepada pihak yang memberi mandat/amanah serta LKjIP sebagai sarana dalam penyediaan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
3. Untuk mengukur, mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat tahun 2023;
4. Sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan yang diperlukan di periode yang akan datang.

D. ASPEK STRATEGIS

Adapun Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Divisi Administrasi
 - a. Rencana kerja dan anggaran satuan kerja di lingkungan Kantor wilayah;
 - b. Layanan keuangan Kanwil Kemenkumham;
 - c. Layanan penata usahaan BMN Kanwil Kemenkumham;
 - d. Layanan kepegawaian Kanwil Kemenkumham;
 - e. Layanan kehumasan Kanwil Kemenkumham;

- f. Layanan perkantoran;
- g. Peralatan dan fasilitas perkantoran;
- h. Gedung/ bangunan;
- i. Kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur pada Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Divisi Pemasyarakatan

Penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah.

Untuk merealisasikan kegiatan Penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah, Divisi Pemasyarakatan melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan fungsi Bintorwasdal terhadap UPT PAS;
- b. Menerima usulan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB) dari Lapas/Rutan;
- c. Menerima laporan bulanan dari UPT;
- d. Menerima usulan remisi dari Lapas/Rutan;
- e. Monitoring Sistem Database Pemasyarakatan (SDP);
- f. Melaksanakan Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban (Satgas Kamtib) secara terjadwal dan insidental di seluruh UPT PAS;
- g. Pengarsipan data Divisi Pemasyarakatan.

3. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

- a. Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia;
- b. Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang notariat;
- c. Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang kewarganegaraan
- d. Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hak asasi manusia
- e. Hasil kajian hak asasi manusia
- f. Dokumen permohonan kekayaan intelektual yang diterima Kantor Wilayah
- g. Promosi dan diseminasi di daerah
- h. Penegakan hukum di daerah
- i. Database kekayaan intelektual komunal
- j. Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah
- k. Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah.
- l. Perencanaan pembangunan hukum di tingkat daerah;

- m. Penelitian dan pengembangan sistem hukum di daerah;
- n. Dokumentasi dan jaringan informasi hukum di daerah;
- o. Kesadaran hukum masyarakat daerah;
- p. Orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum.

4. Divisi Keimigrasian

Pembinaan dan pengawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian. Untuk merealisasikan kegiatan Pembinaan dan pengawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian, Divisi Keimigrasian melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran;
- b. Koordinasi dan Pengelolaan SDM, Sarana Prasarana dan Administrasi Keuangan;
- c. Pembinaan, koordinasi dan konsultasi bidang intelijen, penindakan, informasi dan sarana komunikasi Keimigrasian;
- d. Pembinaan, koordinasi dan konsultasi bidang lalu lintas dan izin tinggal Keimigrasian.

E. ISU STRATEGIS

Pencapaian Kinerja merupakan keberhasilan atau kegagalan dari suatu Institusi. Akan tetapi dalam pencapaiannya ada hal-hal yang dapat menghambat dan menjadi isu strategis. Isu strategis merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pencapaian kinerja. Kantor Wilayah Sumatera Barat selalu memperhatikan isu-isu strategis pada masing-masing divisi yang dapat menghambat pencapaian kinerjanya. Setiap awal tahun masing-masing divisi memetakan faktor-faktor yang kemungkinan menjadi hambatan di tahun 2023.

Pada tahun 2023 perkembangan teknologi informasi semakin berkembang sehingga banyak aplikasi-aplikasi baru yang ada pada masing-masing. Seiring dengan perkembangan Aplikasi-aplikasi tersebut Pegawai dituntut untuk bisa menggunakan dan mengelolanya sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kinerja masing-masing tugas tersebut. Namun masih ada nya pegawai yang belum mampu dan memahami teknologi informasi sehingga belum semua Aplikasi bisa digunakan oleh pegawai. Selain itu, pada satuan kerja masih banyak pegawai yang merangkap

melaksanakan tugas dan mengelola aplikasi-aplikasi tersebut sendiri. Untuk itu penambahan pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai perlu dikembangkan lagi dan hal ini masih menjadi Isu strategis dalam pencapaian kinerja.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Bab I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis
- E. Isu Strategis
- F. Sistematika Laporan

Bab II : Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja

Bab III: Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Capaian Kinerja Anggaran
- D. Capaian Kinerja lainnya

Bab IV: Penutup

- 1. Kesimpulan
- 2. Saran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat sebagai pelaksana program dan tugas-tugas serta kebijakan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sebagian kegiatannya berupa kegiatan Administrasi, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dari Unit Pemasarakatan, Unit Imigrasi serta Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah Sumatera Barat. Melaksanakan amanat Undang- Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Kementerian/Lembaga menyusun dokumen Rencana Strategis sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran. Dalam Perencanaan Strategis yang meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'aruf Amin adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut dilakukan melalui 9 (Sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal dengan Nawacita Kedua yaitu :

1. **Peningkatan kualitas manusia Indonesia;**
2. **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;**
3. **Pembangunan yang merata dan berkeadilan;**
4. **Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;**
5. **Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;**
6. **Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;**
7. **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;**

8. **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;**
9. **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.**

1. VISI KEMENKUMHAM

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

2. MISI KEMENKUMHAM

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

1. Membentuk Peraturan Perundang-undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan;
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

TATA NILAI KEMENKUMHAM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan

sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

"**BerAKHLAK**" adalah singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tanpa henti.

Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat serta

disiplin dan berintegritas tinggi.

- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas .
- Bertindak proaktif.

Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut :

- 1) Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2) Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Prima.
- 3) Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda- benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
- 4) Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
- 5) Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat

serta akses keadilan.

- 6) Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
- 7) Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Propinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang kepala kantor wilayah dan dibantu oleh para Kepala Divisi. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi antara lain :

- 1) Pengoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- 2) Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- 3) Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang

Keimigrasian dan bidang Pemasyarakatan;

- 5) Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, dan;
- 6) Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

B. PERJANJIAN KINERJA

1. Divisi Administrasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1

2. Divisi Pemasyarakatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	82 (indeks)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		Persentase Narapidana resiko tinggi	17%

		yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
		Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%
		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%
		Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%
		Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana /Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/	85%

		Anak pelaku gangguan kamtib	
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%

3. Divisi Keimigrasian

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13

4. Divisi Pelayanan Hukum

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%
3.	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	133 Layanan
		Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus
4.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan

5.	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku
6.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
7.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	6 Orang
8.	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
9.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (indeks)
		Persentase desa / kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%

10.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah
		Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
11.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. CAPAIAN KINERJA DIVISI ADMINISTRASI

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,8	123%

Pada Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Administrasi Tahun 2023 terdapat Sasaran Kegiatan terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien dengan Indikator Kinerja Kegiatan indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah di targetkan dalam kurun waktu 1 Tahun oleh Unit Eselon I sebesar 3,1 Indeks dan telah terealisasi di Tahun 2023 sebesar 3,8 Indeks dengan % capaian sebesar 123%. Nilai realisasi di Tahun 2023 diperoleh berdasarkan rata-rata dari nilai survei indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah yang dilakukan setiap bulannya. Dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2020-2024, formulasi perhitungan realisasi dari Sasaran Kegiatan terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien dengan Indikator Kinerja Kegiatan indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah dengan melakukan survei internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas layanan internal yang dilaksanakan oleh Divisi Administrasi. Terkait dengan survei internal, telah berkoordinasi dengan Bagian Pemantauan Analisis dan Pelaporan (PAP) Biro Perencanaan. Data dari survei internal diperoleh dengan cara Kantor Wilayah melakukan survei secara mandiri atau menggunakan data dari survei Badan Strategi Kebijakan. Terkait realisasi dari indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor

Wilayah, Divisi Administrasi menggunakan data nilai indeks survei integritas internal organisasi dari survei Badan Strategi Kebijakan yang dilakukan setiap bulannya.

Indikator Sasaran Pada Aplikasi *e-Performance*

KODE SS	NAMA SS	JUMLAH IKK	NILAI SS	STATUS SS
SS1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	1	123%	

Nilai Indikator Sasaran dan Status SS dilihat dari Aplikasi *e-Performance*. Nilai Sasaran Strategis Terwujudnya Layanan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah yang Efektif dan Efisien di Tahun 2023 sebesar 123% telah melebihi target. Pada Aplikasi *e-Performance* apabila realisasi melebihi target maka tabel berwarna biru tua.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat	8,85	3,65	3,8	3,8	Terdapat perbedaan format Perjanjian Kinerja antara Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 Pada Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat
2. Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	85	-	-	-	Terdapat perbedaan format Perjanjian Kinerja antara Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 Pada Divisi

Sumatera Barat					Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat sudah tidak ada lagi di Perjanjian Kinerja Tahun 2021 berubah menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan target dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat	85	-	-	-	Terdapat perbedaan format Perjanjian Kinerja antara Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 Pada Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat sudah tidak ada lagi di Perjanjian Kinerja Tahun 2021 berubah menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan target dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Terdapat perbedaan format, target dan nilai skala maksimal indeks capaian realisasi yang ditetapkan oleh Unit Eselon I terkait Perjanjian Kinerja Kepala Divisi

Administrasi dari Tahun 2020 sampai Tahun 2023.

Pada format Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Administrasi Tahun 2020 lebih sederhana hanya menggambarkan target-target yang harus direalisasikan oleh Divisi Administrasi Kantor Wilayah. Target yang ditetapkan Unit Eselon I terkait Indikator Kinerja Kegiatan indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah sebesar 7,1 Indeks dengan nilai skala maksimal indeks capaian realisasi 10 sedangkan format Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Administrasi Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023 lebih lengkap karena menggambarkan target-target yang harus direalisasikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Unit Eselon I dan Divisi Administrasi Kantor Wilayah. Target yang ditetapkan Unit Eselon I terkait Indikator Kinerja Kegiatan indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah terjadi penurunan dari target sebesar 7,1 Indeks menjadi target sebesar 3,1 Indeks dengan nilai skala maksimal indeks capaian realisasi juga mengalami penurunan dari nilai skala 10 menjadi nilai skala 4.

c. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

Kinerja Keuangan Satker	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
PAGU	Rp 18.502.034.000	Rp 17.383.336.000	Rp 18.024.531.000	Rp 22.186.820.000
REALISASI	Rp 18.274.810.000	Rp 17.109.664.428	Rp 17.884.514.771	Rp 22.090.007.028
CAPAIAN	98,77%	98,43%	99,22%	99,56%

Untuk Tahun Anggaran 2022, Pagu Anggaran Program Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat sebesar Rp 18.024.531.000 dengan capaian realisasi Rp 17.884.514.771 atau sebesar 99,22% dari Pagu Anggaran yang ditetapkan. Sedangkan untuk Tahun Anggaran Tahun 2023, Pagu Anggaran Program Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat naik menjadi sebesar Rp 22.186.820.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp 22.090.007.028 atau sebesar 99,56% dari Pagu Anggaran yang ditetapkan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Jangka Menengah					Realisasi Kinerja			
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian -an Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat	7,1	7,2	7,21	7,22	7,23	8,85	3,65	3,8	3,8
Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian -an Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat	85	87	88	89	90	85	-	-	-
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian -an Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat	85	85	85	85	85	85	-	-	-

Terdapat perbedaan dalam penetapan target antara Target Jangka Menengah dengan Target dari Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Administrasi yang ditetapkan oleh Unit Eselon I. Penetapan Target Jangka Menengah dari Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Administrasi Tahun 2020 dan langsung melakukan penetapan target 5 tahun ke depan sedangkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Administrasi Tahun 2021, 2022 Tahun 2023 Unit Eselon I menurunkan target yang telah ditetapkan di tahun sebelumnya terkait Indikator Kinerja Kegiatan indeks

kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah dari target sebesar 7,1 Indeks menjadi target sebesar 3,1 Indeks.

e. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Kegiatan berupa Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat yang efektif dan efisien dengan Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dengan target sebesar 3.1 dapat tercapai secara maksimal karena setiap akhir bulan Kepala Sub Bidang Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia selalu menginformasikan dan share link terkait Pengisian survei integritas internal organisasi dari Badan Strategi Kebijakan melalui wa grup Kantor Wilayah dan wa grup Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat sehingga pegawai melakukan pengisian survei tersebut dan adanya laporan rekapan hasil survei integritas internal organisasi yang menjadi data dukung realisasi dari target Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah setiap bulannya.

Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya :

Selama Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat telah melakukan beberapa upaya efisiensi antara lain :

1. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Sarana dan Prasarana kerja seperti penggunaan AC, Lampu, Laptop, Komputer dan Listrik digunakan pada saat jam kerja dan setelah jam kerja selesai langsung dimatikan.
3. Alat tulis kantor digunakan sesuai kebutuhan.

2. CAPAIAN KINERJA DIVISI PEMASYARAKATAN

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realiasi	Capaian %
1	2	3	4	5
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	82 Indeks	84 Indeks	102%
Meningkatkan Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	99, 93%	111%
	2. Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90%	93%	103%
	3. Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	90%	117%	130%
Meningkatkan pelayanan pembinaan kepribadian, pelatih vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana risiko tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	89%	127%
	2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101%
	3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	97%	114%
	4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	87%	102%
	5. Persentase narapidana risiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, patuh dan disiplin	17%	75%	441%

	6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	40%	129%
	7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	89%	124%
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	100%	125%
	2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%	100%	125%
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	77%	128%
	2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	58%	105%
	3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	66%	189%
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	100%	125%

Anak di wilayah sesuai standar	2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100%
	3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%	99%	110%
	4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	97%	108%
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	100%	118%
	2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	100%	125%
	3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%	100%	118%
	4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	118%
	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%
	3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100 %	118%
	4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa target pada sasaran kegiatan di Perjanjian Kinerja Divisi Pemasarakatan tercapai atau melebihi target pada Tahun 2023. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemsarakatan yang berkualitas di wilayah merupakan Sasaran kegiatan yang baru ditambahkan di tahun 2023, karena tahun sebelumnya tidak ada. Namun Divisi Pemasarakatan dapat mencapai target tersebut. Data diperoleh dari Satuan Kerja Pemasarakatan yang tersebar di wilayah Sumatera Barat sebanyak 26 satker.

Nilai Indikator Sasaran dan Status SS dilihat dari aplikasi *e-Performance*. Nilai sasaran strategis pada Divisi Pemasarakatan Kemenkumham Sumatera Barat tercapai semua sesuai target yang ditetapkan. Pada aplikasi *e-Performance* apabila melebihi target, tabel berwarna biru.

Indikator Sasaran Pada Aplikasi *e-Performance*

KODE SS	NAMA SS	JUMLAH IKK	NILAI SS	STATUS SS
SS1	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemsarakatan yang berkualitas di wilayah	1	102%	
SS2	Meningkatkan Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai standar	3	115%	
SS3	Meningkatkan pelayanan pembinaan kepribadian, pelatih vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana risiko tinggi	7	163%	
SS4	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	2	125%	
SS5	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemsarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	3	141%	
	Meningkatnya Pemenuhan Hak			

SS6	Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	4	111%	
SS7	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	4	121%	
SS8	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	4	121%	

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemasarakatan di Wilayah	7,0	-	-	-	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase Mantan Narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai Pekerjaan di wilayah	35%	-	-	-	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar
Menurunnya Persentase Residivis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat	1%	-	-	-	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham

					Sumbar
Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat	55%	-	-	-	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar
Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	-	80	-	84	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	-	70%	98,45%	99,93%	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	-	70%	95,40%	93%	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	-	70%	93,60%	117%	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada

					Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	-	-	100%	100%	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	-	40%	15%	100%	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	-	60%	93,6%	89%	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	-	97%	100%	100%	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi	-	75%	100%	97%	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasyarakatan

					Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	-	75%	81%	87%	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Dispilin	-	13%	33,3%	75%	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	-	25%	61%	40%	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	-	62%	67%	89%	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar
Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	-	-	-	-	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham

					Sumbar
Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga	-	40%	82,6%	77%	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	-	50%	47,93%	58%	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	-	25%	-	66%	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	-	70%	85%	100%	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	-	70%	100%	99%	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar

Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	-	70%	89,7%	97%	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	-	75%	100%	100%	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	-	60%	100%	100%	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib	-	75%	100%	100%	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	-	60%	100%	100%	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase Pemenuhan	-	71%	-	-	Terdapat perbedaan

Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar					perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	-	92%	-	-	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	-	95%	-	-	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani	-	60%	-	-	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase Tahanan/ Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	-	75%	-	-	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak	-	75%	-	-	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja

Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar					antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh)	-	60%	-	-	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotik	-	23%	-	-	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar
Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP)	-	1	-	-	Terdapat perbedaan perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar

c. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

Kinerja Keuangan Satker	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
PAGU	Rp 843.136.000	Rp 1.175.536.000	Rp 950.944.000	Rp 822.875.000
REALISASI	Rp 818.411.764	Rp 1.169.710.086	Rp 973.142.000	Rp 822.158.058
CAPAIAN	99,29%	99,50%	98,54%	99,91%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada kenaikan realisasi anggaran pada tahun

2021 dan juga ada penambahan anggaran sebesar Rp.332.400.000 untuk kegiatan peningkatan fisik mental dan disiplin petugas pemasyarakatan. Sedangkan di tahun 2022 pagu anggaran turun menjadi Rp. 950.944.000 dengan capaian realisasi sebesar 98,54%. Divisi Pemasyarakatan memiliki pagu anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 822.875.000 Realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 822.1588.058 dengan capaian realisasi sebesar 99,91% kenaikan capaian realisasi sebesar 1,37% dari tahun sebelumnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Jangka Menengah					Realisasi Kinerja			
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	90%	90%	93%	95%	97%	7,0	-	-	-
Persentase Mantan Narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai Pekerjaan di wilayah	-	-	-	-	-	35%	-	-	-
Menurunnya Persentase Residivis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat	-	-	-	-	-	1%	-	-	-
Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat	-	-	-	-	-	55%	-	-	-
Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	-	-	-	-	-	-	80	-	84

Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	-	-	-	-	-	-	70%	98,45%	99,93%
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	-	-	-	-	-	-	70%	95,40%	93%
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	-	-	-	-	-	-	70%	93,60%	117%
Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	-	-	-	-	-	-	60%	100%	100%
Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	-	-	-	-	-	-	40%	15%	100%
Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	-	-	-	-	-	-	60%	93,6%	89%
Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	-	-	-	-	-	-	97%	100%	100%
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	-	-	-	-	-	-	75%	100%	97%
Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	-	-	-	-	-	-	75%	81%	87%
Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan	-	-	-	-	-	-	13%	33,3%	75%

Disiplin									
Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	90%	88%	90%	95%	98%	-	25%	61%	40%
Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	-	-	-	-	-	-	62%	67%	89%
Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga	-	-	-	-	-	-	40%	82,6%	77%
Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	-	-	-	-	-	-	50%	47,93%	58%
Persentase anak yang mendapatkan hak remisi	-	-	-	-	-	-	-	86%	-
Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	-	-	-	-	-	-	25%	-	-
Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	-	-	-	-	-	-	70%	85%	100%
Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%

Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	-	-	-	-	-	-	70%	100%	-
Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	80%	85%	90%	95%	97%	-	70%	89,7%	97%
Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	-	-	-	-	-	-	75%	100%	100%
Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	-	-	-	-	-	-	60%	100%	100%
Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib	-	-	-	-	-	-	75%	100%	125%
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	-	-	-	-	-	-	60%	100%	100%
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	-	-	-	-	-	-	71%	-	-
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	-	-	-	-	-	-	92%	-	-
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	-	-	-	-	-	-	95%	-	-

Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	-	-	-	-	-	-	60%	-	-
Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	-	-	-	75%	-	-
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	-	-	-	75%	-	-
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	-	-	-	-	-	-	60%	-	-
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotik	-	-	-	-	-	-	23%	-	-
Jumlah UPT Pembangunan LembagaPemasyarakatan Perempuan (LPP)	-	-	-	-	-	-	1	-	-

Terdapat perbedaan dalam penetapan target antara Target Jangka Menengah dengan Target dari Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Pemasyarakatan yang ditetapkan oleh Unit Eselon I. Penetapan Target Jangka Menengah dari Rencana Strategis Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Pemasyarakatan Tahun 2020 dan langsung melakukan penetapan target 5 tahun ke depan sedangkan Pada Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Pemasyarakatan Tahun 2021, 2022 dan 2023 Unit Eselon I menurunkan target yang telah ditetapkan di tahun sebelumnya terkait Indikator Kinerja, selain itu Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 tidak sama dengan Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja tahun 2021,

2022 dan 2023.

e. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Keberhasilan :

1. Dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program-program dan kegiatan;
2. Semangat dan Kerjasama seluruh petugas dalam melaksanakan program-program kegiatan;
3. Melakukan kegiatan koordinasi dan sosialisasi dengan melibatkan satuan kerja sehingga capaian kinerja dapat terpenuhi dengan baik.
4. Peningkatan jumlah petugas dan pelatihan yang diberikan kepada petugas dalam peningkatan kinerja;
5. Melaksanakan Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat yang dilaksanakan rutin satu bulan sekali dengan melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan dalam rangka melakukan penilaian kepribadian narapidana yang akan diusulkan integrasi
6. Adanya tanggungjawab dan profesionalitas petugas pemasarakatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk memberikan hak-hak WBP dan memberi pelayanan yang baik bagi WBP, serta optimalisasi pemberdayaan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung
7. Terjalin kerjasama yang baik antara Lapas/Rutan dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota, LSM dan swasta dalam pemenuhan hak pendidikan WBP
8. Mengupayakan ABH (anak berhadapan dengan hukum) untuk mendapatkan diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak, sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
9. Pengelolaan yang baik terhadap anggaran, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang mendukung.

Faktor Penghambat :

1. Belum memadainya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas;
2. Belum terpenuhinya jumlah SDM secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi yang mempuni

Solusi yang dilakukan :

1. Melaksanakan mutasi petugas dalam pemerataan SDM Satuan Kerja;
2. Melaksanakan pelatihan kepada petugas secara langsung maupun secara virtual;
3. Melakukan MoU dengan Dinas terkait.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya personil, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana. Divisi Pemasarakatan memiliki 21 orang petugas yang menjalan tugas dan fungsi yang ada. Selain dari petugas untuk mencapai target kinerja juga dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis yaitu Lembaga Pemasarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasarakatan dan Rumah Pemyimpanan Benda Sitaan Negara.

Dalam penggunaan anggaran Divisi Pemasarakatan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Pelaksanaan Tahun 2023 dan disesuaikan dengan kebutuhan.

3. CAPAIAN KINERJA DIVISI KEIMIGRASIAN

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Kinerja Divisi Keimigrasian Sumatera Barat tahun 2023 diimplemenasikan melalui Sararan Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah” dan “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah”. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah dan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Keimigrasian Di Kantor Wilayah Kementerian Sumatera Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25	3,93	121%
	Indeks Pengamanan Keimigrasian Di Wilayah	3,13	3,73	119%

Indikator Sasaran Pada Aplikasi *e-Performance*

KODE SS	NAMA SS	JUMLAH IKK	NILAI SS	STATUS SS
SS1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	2	120%	

Nilai Indikator Sasaran dan Status SS dilihat dari aplikasi *e-Performance*. Nilai sasaran strategis Meningkatkannya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah melebihi target. Pada aplikasi *e-Performance* apabila melebihi target tabel berwarna biru tua.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Kantor Wilayah Kemenkumham SumateraBarat	17,7	4	3,95	3,93	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumbar

Indeks Kepuasan Internal di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat	-	4	-	-	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumbar
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Kantor Wilayah Sumatera Barat	-	3,82	3,82	3,73	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian Wilayah Sumatera Barat	100%	-	-	-	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumbar

c. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

Kinerja Keuangan Satker	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
PAGU	Rp 1.202.217.000	Rp 1.034.815.000	Rp 1.326.442.000	Rp 2.042.182.000
REALISASI	Rp 715.643.117	Rp 998.178927	Rp 1.281.419.453	Rp 1.997.604.706
CAPAIAN	59,53%	96,46%	96,61%	97,82%

Pada tahun 2023 anggaran Divisi Keimigrasian Sumatera Barat sebesar Rp. 1.527.142.000 dan mendapat anggaran biaya tambahan sebesar Rp. 515.040.000 sehingga total anggaran Divisi Keimigrasian Sumatera Barat menjadi Rp. 2.042.182.000 dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 1.997.604.706 atau sebesar 97,82%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Jangka Menengah					Realisasi Kinerja			
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat	7.3	7.5	7.7	7.9	8	17,7	4	3,95	3,93
Indeks Kepuasan Internal di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Kantor Wilayah Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	3,82	3,82	3,73
Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian	2%	2%	2%	2%	2%	100 %	-	-	-

e. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasi dan pencapaian Indeks Pengamanan pada Divisi Keimigrasian Sumatera Barat tidak terlepas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti :

1. Monitoring, evaluasi, penguatan, koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di lingkungan kerja Divisi Keimigrasian Sumatera Barat (Kantor Imigras Kelas I TPI Padang dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam);
2. Koordinasi dan kolaborasi yang baik Stakeholder Internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Barat dan Stakeholder Eksternal;
3. Perencanaan kegiatan kerja yang baik.

4. CAPAIAN KINERJA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

I. Peraturan Perundang-undangan

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat	80%	100%	125%
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	6 orang	47 orang	783%

Terdapat 2 (dua) Sasaran Kegiatan pada SubBidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, yaitu terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah dan terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan, masing-masing targetnya adalah 80% dan 6 orang. Realisasi Sasaran Kegiatan ini melebihi target yang ditentukan, yaitu masing-masing 100% dan 47 orang.

Nilai Indikator Sasaran dan Status SS dilihat dari aplikasi *e- Performance*. Nilai sasaran strategis Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah sebesar 125% atau melebihi target dan Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan sebanyak 47 orang atau melebihi target. Pada aplikasi *e- Performance* apabila melebihi target, tabel berwarna biru tua.

Indikator Sasaran Pada Aplikasi *e-Performance*

KODE SS	NAMA SS	JUMLAH IKK	NILAI SS	STATUS SS
SS1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	1	125%	
SS2	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	1	783%	

Sedangkan Indikator Sasaran terdapat perbedaan format perjanjian kinerja antara tahun 2020 dengan tahun 2021, 2022 dan 2023 pada Perjanjian Kinerja SubBidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat. Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi target 50 Raperda dan jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan target 30 orang sudah tidak ada lagi di perjanjian kinerja tahun 2021, 2022 dan 2023. Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat pada tahun 2023 meningkat menjadi 125% dibanding tahun sebelumnya. Begitupun dengan Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan meningkat menjadi 47 Orang dari tahun sebelumnya.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	50 Raperda	-	-	-	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada SubBidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah

					Kanwil Kemenkumham Sumbar
Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	30 Orang	-	-	-	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada SubBidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat	-	103%	100%	100%	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada SubBidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kanwil Kemenkumham Sumbar
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	-	30 Orang	32 Orang	47 Orang	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada SubBidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kanwil Kemenkumham Sumbar

c. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

Kinerja Keuangan Satker	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
PAGU	Rp 222.770.000	Rp 340.000.000	Rp 340.000.000	Rp 445.000.000
REALISASI	Rp 210.865.400	Rp 338.083.441	Rp 339.771.000	Rp 444.970.900
CAPAIAN	94,66%	99,64%	99,93%	99,99%

Dari segi realisasi anggaran pada tahun 2021 SubBidang Fasilitasi

Pembentukan Produk Hukum Daerah mengalami peningkatan pagu dan realisasi penyerapan. Realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 99,64 % dan 99,93% meningkat dari tahun 2020 yang realisasi penyerapannya sebesar 94,66 %. Tahun 2023 pagu meningkat menjadi Rp. 445.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 444.970.900 atau sebesar 99,99%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Jangka Menengah					Realisasi Kinerja			
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	50 Raperda	50 Raperda	60 Raperda	60 Raperda	70 Raperda	50 Raperda	-	-	-
Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	30 Orang	30 Orang	35 Orang	35 Orang	40 Orang	30 Orang	-	-	-
Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	103%	100%	100%
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	30 Orang	32 Orang	47 Orang

e. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Pengukuran kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Jika dilihat pada tabel perjanjian kinerja tahun 2023 dinyatakan bahwasanya target capaian kinerja di angka 80%. Realisasi anggaran pada

akhir Desember kegiatan Program Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah, dari data yang diperoleh dinyatakan bahwasanya jumlah anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 449.970.900 jika di hitung dalam hitungan persen maka pencapaian kinerja pada tahun 2023 di angka 99.99 %. Jadi dapat dinyatakan kinerja yang telah di capai pada tahun 2023 memenuhi target yang telah di tetapkan dalam perjanjian kinerja.

Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja tahun 2023 serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Terjalannya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dalam pelaksanaan fasilitasi dan harmonisasi produk hukum daerah, yang mana kemudian koordinasi yang baik itu diwujudkan dengan penandatanganan MOU pada tanggal 4 juni 2021. Mou ini berlaku lima tahun dari tanggal ditetapkan.
2. Adanya pertemuan-pertemuan dan FGD dengan Pemerintah Provinsi yang berujung kepada kesepakatan bahwa untuk rancangan peraturan daerah yang akan difasilitasi di biro hukum pemerintah provinsi adalah rancangan peraturan daerah yang telah dilakukan harmonisasi di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dan hal ini dibuktikan dengan surat selesai harmonisasi yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber Daya sebagai berikut :

Melaksanakan kegiatan fasilitasi harmonisasi produk hukum daerah dengan pemerintah daerah dengan metode sharing dana, yakni dalam hal dana APBN pelaksanaan fasilitasi harmonisasi produk hukum daerah tidak memadai, maka fasilitasi harmonisasi produk hukum daerah dilaksanakan dengan pembiayaan dari Pemerintah Daerah.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja, sebagai berikut :

1. E-Perda rancang merupakan merupakan portal website yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari kepala daerah di Provinsi Sumatera Barat. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan proses pengharmonisasian rancangan peraturan daerah dapat dilakukan dengan lebih mudah, lebih cepat, efektif dan efisien untuk mendukung percepatan pelayanan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan dan mewujudkan terbentuknya perda yang responsif, harmonis, terencana dan akuntabel.
2. Pelaksanaan Harmonisasi sesuai SOP yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah.
3. Pelaksanaan harmonisasi secara efektif, efisien, tepat waktu dan akuntabel
4. Pelaksanaan PILAH Perda (Pendampingan Inventarisasi, analLisis, evAluasi, Harmonisasi Peraturan Daerah), PILAH Perda dilakukan bekerjasama dengan 19 kab/kota di Sumatera Barat untuk melakukan pendampingan evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang bermasalah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk kemudian dicabut oleh kab/kota yang bersangkutan.
5. Pelaksanaan kerjasama dengan DPRD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dalam pembentukan produk hukum daerah.
6. Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik yang bekerja sama dengan DPRD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.
7. Peningkatan keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukan produk hukum daerah yakni penugasan tenaga perancang untuk menjadi tenaga ahli dalam proses penyusunan propemperda, penyusunan naskah akademik, penyusunan racangan peraturan daerah, dan pembahasan rancangan peraturan daerah, serta keikutsertaan tenaga perancang dalam tahap penyusunan rancangan peraturan kepala daerah.

II. Badan Pembinaan Hukum Nasional

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	93%	113%
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	91%	114%
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (indeks)	88 (indeks)	115%
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	100%	143%
	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	33%	165%

Sasaran Kegiatan pada BPHN adalah Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah terdapat 1 (satu) indikator kinerja kegiatan dan Meningkatkan kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah terdapat 5 (Lima) indikator

kinerja kegiatan.

Nilai Indikator Sasaran dan Status SS dilihat dari aplikasi *e-Performance*. Nilai sasaran strategis Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi prosuk hukum di wilayah sebesar 100% atau tercapainya target, tabel berwarna hijau dan Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah sebesar 130% atau melebihi target, tabel berwarna biru tua.

Indikator Sasaran Pada Aplikasi e-Performance

KODE SS	NAMA SS	JUMLAH IKK	NILAI SS	STATUS SS
SS1	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	1	100%	
SS2	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	5	130%	

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Jumlah orang/kelompok Masyarakat Miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi	72 Orang	-	-	-	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada SubBidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum Dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kanwil Kemenkumham Sumbar

Jumlah Kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	8 kegiatan	-	-	-	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada SubBidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum Dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kanwil Kemenkumham Sumbar
Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Kantor Wilayah	-	-	-	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada SubBidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum Dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kanwil Kemenkumham Sumbar
Jumlah penyuluh hukum di daerah	1 Kantor Wilayah	-	-	-	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada SubBidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum Dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kanwil Kemenkumham Sumbar
Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukandan pemantauan produk hukum daerah	1 Kantor Wilayah	-	-	-	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada SubBidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum Dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kanwil Kemenkumham Sumbar
Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIH	1 Kantor Wilayah	-	-	-	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada SubBidang Penyuluhan

					Hukum, Bantuan Hukum Dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kanwil Kemenkumham Sumbar
Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	-	5 Kegiatan	3 kegiatan	2 Kegiatan	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada SubBidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum Dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan	-	263%	89%	93%	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada SubBidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum Dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai denganperaturan perundang- undangan	-	200%	130%	91%	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada SubBidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum Dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kanwil Kemenkumham Sumbar
Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	-	83	61,27	88	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada SubBidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum Dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kanwil Kemenkumham Sumbar

Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk dimasing-masing wilayah	-	93%	89%	100%	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada SubBidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum Dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	-	20%	42%	33%	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada SubBidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum Dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kanwil Kemenkumham Sumbar

c. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

Kinerja Keuangan Satker	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
PAGU	Rp 994.814.000	Rp 1.080.068.000	Rp 1.032.572.000	Rp 1.663.803.000
REALISASI	Rp 944.436.968	Rp 1.058.138.125	Rp 1.029.289.780	Rp 1.648.000.000
CAPAIAN	94,94%	97,97%	99,68%	99,05%

Pagu anggaran BPHN pada Tahun 2021 sebesar Rp. 1.080.068.000 dengan capaian sebesar 97,97% dan pada tahun 2022 pagu anggaran turun menjadi Rp. 1.032.572.000 dengan capaian sebesar 99,68% sedangkan pada tahun 2023 pagu anggaran naik sebesar Rp. 1.663.803.000 dengan capaian sebesar 99,05 %.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Jangka Menengah					Realisasi Kinerja			
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah orang/kelompok Masyarakat Miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi	300 Orang	300 Orang	320 Orang	320 Orang	320 Orang	72 Orang	-	-	-
Jumlah Kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	81 Kegiatan	81 Kegiatan	81 Kegiatan	81 Kegiatan	81 Kegiatan	8 kegiatan	-	-	-
Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	4 kali	4 kali	6 kali	6 kali	6 kali	1 Kantor Wilayah	-	-	-
Jumlah penyuluh hukum di daerah	19 Orang	19 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	1 Kantor Wilayah	-	-	-
Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	19 Kegiatan	19 Kegiatan	19 Kegiatan	20 Kegiatan	19 Kegiatan	1 Kantor Wilayah	-	-	-
Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDJHN	6 kali	6 kali	6 kali	7 kali	6 kali	1 Kantor Wilayah	-	-	-
Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	-	-	-	-	-	-	5 Kegiatan	3 kegiatan	2 Kegiatan
Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	263%	89%	93%

Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	200%	130%	91%
Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	-	-	-	-	-	-	83	61,27	88
Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	-	-	-	-	-	-	93%	89%	100%
Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/ sistem integrasi JDIHN	-	-	-	-	-	-	20%	42%	33%

e. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab Keberhasilan :

1. Terlaksananya kordinasi yang baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat melalui Panitia Pengawas Daerah Bantuan Hukum dengan Stakeholders di Wilayah Sumatera Barat, Organisasi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum terkait Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin;
2. Terselenggaranya kegiatan pembinaan desa sadar hukum dan penyuluhan hukum di Wilayah Sumatera Barat dengan peran aktif dari Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang terjun langsung ke lapisan masyarakat paling bawah dengan Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah;
3. Peran aktif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mendorong Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah yang meliputi Sekretaris Daerah Kab/Kota dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk pengelolaan website JDIH yang baik dan mengintegrasikannya dengan JDIH Nasional;
4. Dilakukannya optimalisasi penggunaan Anggaran Tahun 2023 dengan penyerapan anggaran mencapai 99,05 %;

5. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia;
6. Adanya komitmen dari semua Pejabat di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja

Dari sasaran strategis yang dilaksanakan Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat jika dilihat dari realisasi capaian kinerja di tahun 2023 telah melebihi target, sedangkan untuk realisasi keuangan sampai semester 2 sebesar 99.05%. Hal ini terlaksana karena adanya koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Bantuan Hukum dan instansi terkait.

III. Kekayaan Intelektual

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitas Kantor Wilayah	133 Layanan	133 Layanan	100%
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus	3 Lokus	300%
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Presentase penanganan aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100 %
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	2 Lokus	2 Lokus	100%
	Kegiatan pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	1 Laporan	100%

Dari Tabel diatas dapat kita lihat tercapainya permohonan pendaftaran atau pencatatan kekayaan intelektual yang jauh melebihi target adalah buah dari hasil kerja keras Kantor Wilayah kementerian hukum dan HAM sumatera barat pada program kekayaan intelektual. Selama tahun 2023 per tanggal 27 Desember ini Kantor Wilayah aktif bekerjasama dengan stakeholder di wilayah Sumatera Barat dalam bentuk kerjasama, promosi, diseminasi dan fasilitasi permohonan kekayaan intelektual dalam bentuk pendaftaran online melalui website dgip.go.id. Kantor wilayah mengambil peran untuk mendorong dinas yang membidangi IKM dan UKM disumatera barat terkait pendaftaran merek. Selanjutnya bekerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di sumatera barat guna pencatatan ciptaan dan permohonan paten, dan desain industri. Terakhir kantor wilayah berhasil mengajukan permohonan indikasi geografis . Tercatat pada tanggal 27 Desember tahun 2023 dalam hal kerjasama, promosi ,desiminasi dan fasilitasi kantor wilayah telah memetik hasil dari layanan penerimaan permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual yang ditargetkan 133 layanan permohonan dengan capaian kinerja 8.137 permohonan pendaftaran kekayaan intelektual. Pergesaran jumlah permohonan ini merupakan hasil inovasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui program IPROLINE (Intellectual Properti Online). Dimana dengan IPROLINE pemohon dapat mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan intelektualnya dimanapun dan kapanpun.

Nilai Indikator Sasaran dan Status SS dilihat dari aplikasi *e-Performance*. Nilai sasaran strategis Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebesar 200% atau melebihi target, tabel berwarna biru tua dan Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal sebesar 100% atau tercapai target, tabel berwarna hijau.

Indikator Sasaran Pada Aplikasi *e-Performance*

KODE SS	NAMA SS	JUMLAH IKK	NILAI SS	STATUS SS
SS1	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan	2	200%	

	HAM			
SS2	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	3	100%	

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah	200 Jumlah Permohonan	-	-	-	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada SubBidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Sumbar
Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	30 Stakeholder	-	-	-	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada SubBidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Sumbar
Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	-	-	-	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada SubBidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Sumbar

Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat	-	210 Layanan	210 Layanan	133 Layanan	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada SubBidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Sumbar
Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah	-	1 Lokus	1 Lokus	3 Lokus	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada SubBidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	-	100%	100%	100%	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada SubBidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Sumbar
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	-	1 Kegiatan	2 Lokus	2 Lokus	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada SubBidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Sumbar
Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah Kantor Wilayah	-	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada SubBidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Sumbar

c. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

Kinerja Keuangan Satker	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
PAGU	Rp 640.915.000	Rp 850.915.000	Rp 913.695.000	Rp 1.342.490.000
REALISASI	Rp 593.290.946	Rp 828.361.250	Rp 912.443.677	Rp 1.341.113.994
CAPAIAN	94,03%	97,35%	99,86%	99,90%

Pagu anggaran KI pada tahun 2021 sebesar Rp. 850.915.000 dengan capaian 97,35%. Pada tahun 2022 pagu anggaran naik menjadi Rp. 913.695.000 dengan capaian 99,86% sedangkan pada tahun 2023 pagu naik lagi menjadi Rp. 1.342.490.000 dengan capaian 99,90%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Jangka Menengah					Realisasi Kinerja			
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah penyelesaian permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah	200 Pemo hon	210 Pemo hon	220 Pemo hon	220 Pemo hon	220 Pemo hon	200 Pemo hon	-	-	-
Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para Stakeholder KI oleh kantor wilayah	30 Stoke holder	30 Stoke holder	30 Stoke holder	30 Stoke holder	30 Stoke holder	30 Stoke holder	-	-	-
Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	3 Lokus	3 Lokus	4 Lokus	4 Lokus	2 Lokus	-	-	-
Jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	-	-	-	-	-	-	210 Layanan	210 Layanan	133 Layanan

Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah	-	-	-	-	-	-	1 Lokus	1 Lokus	3 Lokus
Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	2 Lokus	2 Lokus
Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	-	-	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan

e. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari sasaran kegiatan yang dilaksanakan Subbidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah jika dilihat dari realisasi capaian kinerja di tahun 2023 telah mencapai 100%, sedangkan untuk realisasi keuangan sebesar 99,90%. Hal ini terlaksana karena adanya koordinasi yang baik dengan stake holder/instansi terkait.

Penyebab keberhasilan :

1. Terlaksananya koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait dalam pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual;
2. Terlaksananya perjanjian kinerja dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual;
3. Terlaksananya sosialisasi secara terus menerus untuk menunjukkan memberikan informasi kepada masyarakat terkait pendaftaran kekayaan intelektual;
4. Optimalisasi penggunaan Anggaran Tahun 2023;
5. Memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Subbidang

Pelayanan Kekayaan Intelektual untuk memaksimalkan pelaksanaan seluruh kegiatan;

6. Mengoptimalkan Sarana Prasarana yang tersedia untuk menunjang kegiatan.

IV. Administrasi Hukum Umum

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
Terwujudnya layanan Adminitrasi Hukum Umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah	5%	Penurunan 0,7% dari Tahun 2022	Penurunan 14% dari Tahun 2022
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan Pelaksanaan jabatan Notaris di Wilayah	86%	100%	116%

Dari Tabel di atas dapat dilihat capaian perolehan PNBP dan permohonan pendaftaran atau layanan terkait program administrasi hukum umum.

Selama tahun 2023 per tanggal 31 Desember 2023, Kantor Wilayah aktif bekerjasama dengan stakeholder di wilayah Sumatera Barat dalam bentuk kerjasama, promosi, diseminasi dan fasilitasi permohonan administiras hukum umum dalam bentuk pendaftaran online melalui website ahu.go.id.

Kantor wilayah mengambil peran untuk mendorong peningkatan perolehan PNBP yang ditargetkan sebesar 5%.

Nilai Indikator Sasaran dan Status SS dilihat dari aplikasi *e-Performance*. Nilai sasaran strategis Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum sebesar penurunan 14% dari tahun 2022 atau minus dari target, tabel berwarna abu-abu dan Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD sebesar 116% atau melebihi target, tabel berwarna biru tua.

Indikator Sasaran Pada Aplikasi *e-Performance*

KODE SS	NAMA SS	JUMLAH IKK	NILAI SS	STATUS SS
SS1	Terwujudnya layanan Adminitrasi Hukum Umum di wilayah yang berkepastian hukum	1	-14%	
SS2	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	1	116%	

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Indeks tingkat Pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di Lingkungan Kantor Wilayah Sumatera Barat	3,0	-	-	-	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada SubBidang Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase layanan program AHU di lingkungan Kantor Wilayah Sumatera Barat yang diselesaikan	80%	-	-	-	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada SubBidang Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat	-	5%	5%	-0,7%	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada SubBidang Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkumham Sumbar

Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat	-	82%	95%	100%	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada SubBidang Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkumham Sumbar
---	---	-----	-----	------	--

c. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

Kinerja Keuangan Satker	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
PAGU	Rp 2.562.000.000	Rp 2.834.550.000	Rp 3.028.350.000	Rp 3.486.602.000
REALISASI	Rp 1.712.335.013	Rp 2.689.089.449	Rp 3.026.937.971	Rp 3.474.182.900
CAPAIAN	66,84%	94,87%	99,95%	99,76%

Pagu anggaran AHU pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.834.550.000 dengan capaian 94,87%, pada tahun 2022 pagu anggaran naik menjadi Rp. 3.028.350.000 dengan capaian 99,55% sedangkan pada tahun 2023 pagu naik lagi menjadi Rp. 3.486.602.000 dengan capaian 99,76%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Jangka Menengah					Realisasi Kinerja			
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indeks tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di lingkungan Kantor Wilayah Sumatera Barat	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-
Persentase layanan program AHU di lingkungan Kantor Wilayah Sumatera Barat	80%	82%	82%	83%	83%	80%	-	-	-
Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di Kantor	-	-	-	-	-	-	5%	5%	-0,7%

Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat									
Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	82%	95%	100%

e. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari sasaran strategis yang dilaksanakan Subbidang Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah jika dilihat dari realisasi capaian kinerja di tahun 2023 telah mencapai 99,50%, sedangkan untuk realisasi keuangan sebesar 99,76%. Hal ini terlaksana karena adanya koordinasi yang baik dengan stakeholder/instansi terkait.

Penyebab keberhasilan :

1. Terlaksananya koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait dalam pendampingan permasalahan AHU di Wilayah;
2. Terlaksananya perjanjian kinerja dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan permohonan pendaftaran AHU, khususnya Perseroan Perorangan;
3. Terlaksananya sosialisasi secara terus menerus untuk menunjukkan memberikan informasi kepada masyarakat terkait pendaftaran Administrasi Hukum Umum;
4. Optimalisasi penggunaan Anggaran Tahun 2023;
5. Memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum untuk memaksimalkan pelaksanaan seluruh kegiatan;
6. Mengoptimalkan Sarana Prasarana yang tersedia untuk menunjang kegiatan.

Penyebab kegagalan :

Pada butir perjanjian kinerja dengan indikator kinerja kegiatan Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di Wilayah sebesar 5%, terjadi penurunan 0,7% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena jumlah nilai permohonan kurang dari sekitar Rp. 50.000.000. Oleh karena itu, poin ini menjadi bahan evaluasi untuk mendorong kembali layanan AHU dipergunakan dan diketahui secara luas oleh masyarakat pada tahun berikutnya.

V. Pemajuan HAM

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah	6 Instansi Pemerintah	150%
	Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah	15 Instansi Pemerintah	500%
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	14 Instansi Pemerintah	1400%
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia DiWilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia DiWilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100%

Sasaran kegiatan demi terwujudnya Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah di Kantor Wilayah dengan sasaran startegis pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM terdiri dari kegiatan Aksi HAM, Kab/Kota Peduli HAM dan Diseminasi P2HAM, sedangkan rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah terdiri dari kegiatan fasilitasi penanganan dugaan

permasalahan HAM.

Nilai Indikator Sasaran dan Status SS dilihat dari aplikasi *e-Performance*. Nilai sasaran strategis Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM sebesar 683% atau melebihi target, tabel berwarna biru tua dan Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah sebesar 100% atau tercapai target, tabel berwarna hijau.

Indikator Sasaran Pada Aplikasi *e-Performance*

KODE SS	NAMA SS	JUMLAH IKK	NILAI SS	STATUS SS
SS1	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3	683%	
SS2	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	1	100%	

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

Indikator Sasaran	2020	2021	2022	2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan programaksi HAM	3 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah	6 Instansi Pemerintah	
Jumlah kab/kota peduli HAM	11 Kab/Kota	2 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah	15 Instansi Pemerintah	Penilaian KKP HAM ditiadakan tahun 2021

Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	3 Instansi Pemerintah	7 Instansi Pemerintah	14 Instansi Pemerintah	
Jumlah rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi	11 Rekomendasi	3 Rekomendasi	

c. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

Kinerja Keuangan Satker	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
PAGU	Rp 240.482.000	Rp 245.482.000	Rp 236.482.000	Rp.246.982.000
REALISASI	Rp 230.639.200	Rp 240.019.736	Rp 236.351.018	Rp 246.935.000
CAPAIAN	95,91%	97,77%	99,94%	99,98%

Pagu anggaran Pemajuan HAM pada tahun 2021 sebesar Rp. 245.482.000 dengan capaian 97,77%, pada tahun 2022 pagu anggaran turun menjadi Rp. 236.482.000 dengan capaian 99,94% sedangkan pada tahun 2023 pagu naik menjadi Rp. 246.982.000 dengan capaian 99,98%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Jangka Menengah					Realisasi Kinerja			
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	6 Instansi Pemerintah	6 Instansi Pemerintah	6 Instansi Pemerintah	6 Instansi Pemerintah	6 Instansi Pemerintah	3 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah	6 Instansi Pemerintah
Jumlah kab/kota peduli HAM	19 kab/kota	19 kab/kota	19 kab/kota	19 kab/kota	19 kab/kota	11 kab/kota	2 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah	15 Instansi Pemerintah

Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerin tah	1 Instansi Pemerin tah	1 Instansi Pemerin tah	1 Instansi Pemerin tah	1 Instansi Pemerin tah	1 Instansi Pemerin tah	3 Instansi Pemerin tah	7 Instansi Pemerin tah	14 Instansi Pemerin tah
Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Reko mendasi	3 Reko mendasi	3 Reko mendasi	3 Reko mendasi	3 Reko mendasi	3 Reko mendasi	4 Reko mendasi	11 Reko mendasi	3 Reko mendasi

e. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan

Pada tahun anggaran 2023, Subbidang Pemajuan HAM mempunyai sasaran strategis utama yakni mengoptimalkan peran dalam Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM, serta dua sasaran kegiatan yakni :

1. Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM. Memiliki indikator kinerja kegiatan yakni :
 - a. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM sebesar 150%
Terjadi peningkatan kinerja karena adanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan instansi terkait yakni antara bagian hukum Kab/Kota, Bappeda Kab/Kota dan OPD terkait.
 - b. Jumlah kab/kota peduli HAM sebesar 500%
Terjadi peningkatan kinerja sebanyak 500% karena adanya koordinasi yang baik antara Kanwil dengan Pemda dalam pemenuhan data dukung kriteria KKPHAM sehingga 15 Kab/Kota di Sumatera Barat meraih penghargaan KKPHAM.
 - c. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM sebesar 1400%
Terjadi peningkatan kinerja sebanyak 1400% karena adanya koordinasi yang baik antara Kanwil dengan Ditjen HAM dan unit kerja yang terdiri dari UPT Pemasarakatan dan UPT Keimigrasian

sehingga terdapat 14 Unit Kerja yang meraih penghargaan P2HAM

2. Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah. Memiliki indikator kinerja kegiatan yakni Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah sebesar 100%. Target tercapai karena Tim Pengaduan telah menindaklanjuti seluruh pengaduan yang masuk ke Kantor Wilayah.

Kendala

1. Masih banyak OPD menyerahkan data dukung Aksi HAM yang kurang lengkap sesuai Perpres no 53 tahun 2021 disebabkan oleh ada beberapa data yang tidak bisa dipenuhi yang bersifat rahasia dan juga ada OPD yang tidak memiliki beberapa data yang harus dipenuhi dalam pelaporan Aksi HAM
2. Walaupun ada 15 Kab/Kota yang mendapat predikat KKPHAM, namun terdapat permasalahan yakni sedikitnya anggaran sehingga di tahun 2023 Kanwil hanya bisa berkoordinasi langsung ke 2 Kab/Kota saja dan 17 Kab/Kota hanya bisa dikoordinasikan melalui 1 kali rakor dan wag saja.
3. Dari 29 unit kerja hanya 14 unit kerja yang mendapatkan penghargaan P2HAM karena terkendala dalam masih kurangnya pemahaman dalam pemenuhan data dukung sesuai Permenkumham yang baru. Dan juga terbatasnya anggaran yang ada dalam pelaksanaan pembinaan P2HAM sehingga tidak semua upt yang bisa dilakukan koordinasi dan evaluasi dalam Pembinaan P2HAM dimana terdapat 28 UPT di Provinsi Sumatera Barat
4. Kurangnya respon/tanggapan dari instansi terkait dalam menanggapi rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM dari Kantor Wilayah.

Solusi

1. Mendorong Pemda Kabupaten/Kota dalam pemenuhan laporan capaian Aksi HAM dengan melaksanakan rapat koordinasi maupun rapat evaluasi dengan instansi terkait.

2. Mendorong Kab/Kota yang belum meraih penghargaan KKPHAM dengan berkoordinasi dengan memberikan sosialisasi/rakor langsung ke OPD pengampu dalam pemenuhan indikator KKPHAM dan mengenai anggaran langkahnya adalah mendorong Pemda untuk menganggarkan kegiatan seputar KKPHAM yang merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya.
3. Mendorong unit kerja yang belum meraih penghargaan P2HAM dengan berkoordinasi dengan memberikan sosialisasi/evaluasi langsung ke UPT pdalam pemenuhan kriteria P2HAM dan juga perlunya penambahan anggaran untuk pelaksanaan pembinaan P2HAM bagi Pemerintah Daerah Kab/Kota maupun UPT di Provinsi Sumatera Barat.
4. Mendorong Pemda dalam menyelesaikan permasalahan HAM yang ada dan berkoordinasi ke Ditjen HAM untuk langkah selanjutnya jika tidak ada tanggapan dari Pemda terkait dalam penyelesaian permasalahan dan juga perlunya peran Kepala Daerah untuk meningkatkan kerja sama antar OPD terkait dalam pengumpulan data Aksi HAM yang ada pada OPD tersebut dan juga terhadap penanganan dugaan pelanggaran HAM.

VI. Badan Strategi Kebijakan

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80 %	100%	125%
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100%

Nilai Indikator Sasaran dan Status SS dilihat dari aplikasi *e-Performance*. Nilai

sasaran strategis Rekomendasi Hasil Analisis Strategis Kebijakan Hukum dan HAM di Wilayah sebesar 112% atau melebihi target, tabel berwarna biru tua

Indikator Sasaran Pada Aplikasi *e-Performance*

KODE SS	NAMA SS	JUMLAH IKK	NILAI SS	STATUS SS
SS1	Rekomendasi Hasil Analisis Strategis Kebijakan Hukum dan HAM di Wilayah	2	112%	

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

Indikator Sasaran	2020	2021	2022	2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan oleh unsur - unsur organisasi Kementerian Hukum dan HAM	60 %	-	-	-	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada SubBidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumbar
Hasil Penelitian / pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM disosialisasikan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat	1 Buku	-	-	-	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada SubBidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumbar
Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	-	70 %	80%	100 %	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada SubBidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kanwil

					Kemenkumham Sumbar
Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	-	1 Buku	1 Buku	1 Buku	Terdapat perbedaan format Perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada SubBidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumbar

c. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

Kinerja Keuangan Satker	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
PAGU	Rp 65.195.000	Rp 211.100.000	Rp 152.070.000	Rp. 189.990.000
REALISASI	Rp 52.790.500	Rp 202.563.000	Rp 151.954.676	Rp 189.932.400
CAPAIAN	80,97%	95,96%	99,9%	99,97%

Pagu anggaran SubBidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM pada tahun 2021 sebesar Rp. 211.100.000 dengan capaian 95,96%, pada tahun 2022 pagu anggaran turun menjadi Rp. 152.070.000 dengan capaian 99,9% sedangkan pada tahun 2023 pagu naik menjadi Rp. 189.990.000 dengan capaian 99,97%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Jangka Menengah					Realisasi Kinerja			
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan oleh unsur – unsur organisasi Kementerian Hukum dan HAM	60%	60%	60%	60%	60%	60 %	-	-	-

Hasil Penelitian / pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM disosialisasikan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	-	-	-
Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	-	-	-	-	-	-	70 %	80%	100 %
Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	-	-	-	-	-	-	1 Buku	1 Buku	1 Buku

e. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan

Pada tahun anggaran 2023, Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM mempunyai sasaran strategis utama yakni Rekomendasi Hasil Analisis Strategis Kebijakan Hukum dan HAM di Wilayah, serta dua sasaran kegiatan yakni Presentasi Rekomendasi Hasil Kajian di wilayah Sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan target 100 % dan Hasil Penelitian Hukum dan HAM yang diSosialisasikan di Wilayah dengan target 1 Buku. Kedua butir sasaran kegiatan tersebut berhasil dicapai dengan terselesaikannya rekomendasi hasil kajian di wilayah berupa laporan analisis yang menghasilkan rekomendasi dan 1 buku dari hasil sosialisasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

Kendala

Masih kurangnya anggaran dan jumlah sumber daya manusia/pegawai untuk penunjang kegiatan seperti anggaran kegiatan pengumpulan data hasil survei IPK-IKM yang masih kurang mengingat jumlah satker yang banyak sehingga tidak semua UPT dapat dikunjungi untuk pengumpulan data hasil survei IPK-IKM.

Solusi

1. Penambahan Anggaran
2. Penambahan Sumber Daya Manusia/Pegawai
3. Penambahan PC atau perangkat Komputer

B. REALISASI ANGGARAN

Kinerja Keuangan Satker	2022	2023
PAGU	Rp. 201.941.529.000	Rp. 209.168.138.000
REALISASI	Rp. 191.812.455.525	Rp. 207.521.920.739
CAPAIAN	94,98%	99,21%

Pagu Anggaran Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat Tahun 2022 mencapai angka Rp 201.941.529.000 dengan capaian realisasi Rp 191.812.455.525 atau sebesar 94.98% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Sedangkan pada Tahun 2023, Pagu Anggaran Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat naik menjadi sebesar Rp 209.168.138.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 207.521.920.739 atau sebesar 99,21% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Aplikasi SMART DJA merupakan aplikasi untuk menginput Capaian Kinerja perbulannya yang nantinya akan menghasilkan nilai capaian kinerja masing-masing Satker. Aplikasi SMART ini diinput paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Berikut Capaian Nilai SMART tahun 2023 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat sebagai berikut :

No	Satker	(Kode Satker)	Nilai SMART	Ket
1	Kanwil Sekjen	(408798)	99,60	
2	Kanwil AHU	(408792)	93,47	
3	Kanwil PAS	(408793)	90,82	
4	Kanwil Imigrasi	(408794)	98,95	

5	Kanwil KI	(408795)	98,82	
6	Kanwil PP	(408796)	98,34	
7	Kanwil HAM	(408797)	86,32	
8	Kanwil BPHN	(408799)	99,84	
9	Kanwil BSK	(408800)	100,00	
10	LP Padang	(406002)	93,22	
11	LP Pariaman	(406018)	99,61	
12	LP Painan	(406024)	99,05	
13	LP Alahan Panjang	(406033)	99,19	
14	Rutan Muara Labuh	(406049)	99,23	
15	LP Bukittinggi	(406055)	98,70	
16	LP Talu	(406061)	99,86	
17	Rutan Padang Panjang	(406080)	98,80	
18	Rutan Maninjau	(406086)	99,70	
19	Rutan Lubuk Sikaping	(406092)	99,54	
20	LP Payakumbuh	(406106)	99,70	
21	LP Suliki	(406112)	98,95	
22	Rutan Sawahlunto	(406121)	99,14	
23	LP Solok	(406137)	99,34	
24	LP Sinjunjung	(406143)	99,53	
25	Rutan Batu Sangkar	(406152)	99,89	
26	Kanim Padang	(408582)	99,19	
27	Bapas Padang	(408686)	99,55	
28	LPKA TJ Pati	(524232)	99,34	
29	RUPBASAN Padang	(632616)	99,52	
30	Kanim Bukittinggi	(652393)	96,84	
31	LP Lubuk Basung	(652831)	99,33	
32	LP Terbuka Pasaman	(652890)	99,00	
33	Bapas Bukittinggi	(653086)	98,28	
34	LP Dharmasraya	(683994)	93,02	
35	LPN Sawahlunto	(683993)	98,15	
36	Rutan Padang	(683995)	88,74	

37	LPP	(418334)	98,71	
----	-----	----------	-------	--

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dari sisi keuangan terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat untuk periode yang berakhir pada 29 Desember 2023, adalah sebagai berikut :

ASPEK KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	ASPEK KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN	ASPEK KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN
<ul style="list-style-type: none"> •REVISI DIPA : 10.00 •DEVIASI HALAMAN III DIPA : 9.23 	<ul style="list-style-type: none"> •PENYERAPAN ANGGARAN : 19.66 <ul style="list-style-type: none"> •DATA KONTRAK : 9.29 •PENYELESAIAN TAGIHAN : 10.00 •PENGELOLAAN UP DAN TUP : 10.00 <ul style="list-style-type: none"> •DISPENSASI SPM : 5.00 	<ul style="list-style-type: none"> •CAPAIAN OUTPUT : 25.00

Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA, terdiri dari 2 indikator :

Revisi Dipa	Indikator Revisi Dipa Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat untuk periode yang berakhir pada 29 Desember 2023 adalah sebesar 10% dengan artian memenuhi seluruh target bobot indikator revisi DIPA yang telah ditetapkan. Untuk mempertahankan capaian ini, Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap).
Halaman III	Indikator Deviasi Halaman III Dipa Kanwil Kemenkumham Sumatera

DIPA	Barat untuk periode yang berakhir pada 29 Desember 2023 adalah sebesar 10% dengan artian memenuhi seluruh target bobot. Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, Kanwil Kemenkumham Sumbar telah melakukan upaya untuk lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dana, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satuan Kerja.
-------------	---

Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran, terdiri dari 5 indikator :

Penyerapan Anggaran	Indikator Penyerapan Anggaran Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat untuk periode yang berakhir pada 29 Desember 2023 adalah sebesar 19.66% dari bobot indikator yang telah ditetapkan yaitu 20%. Untuk memenuhi target capaian ini, Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat telah berupaya senantiasa memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif misalnya menyegerakan kegiatan yang dapat dilaksanakan segera, Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
Data Kontrak	Indikator Penyampaian Data Kontrak Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat untuk periode yang berakhir pada 29 Desember 2023 adalah sebesar 9.85% dari bobot indikator yang telah ditetapkan yaitu 10%. Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat senantiasa berupaya untuk meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak yakni maksimal 5 hari kerja setelah ditandatangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN
Penyelesaian Tagihan	Indikator Penyelesaian Tagihan Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat untuk periode yang berakhir pada 29 Desember 2023 adalah 10%. Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat telah senantiasa berupaya meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja

	<p>Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditandatangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat telah senantiasa untuk teliti, lengkap dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP.</p>
<p>Pengelolaan UP dan TUP</p>	<p>Indikator Pengelolaan UP dan TUP Kanwil Kemenkumham Barat untuk periode yang berakhir pada 29 Desember 2023 adalah sebesar 10%. Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat telah senantiasa berupaya untuk memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender sejak SP2D UP/GUP diterbitkan (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.</p>
<p>Dispensasi SPM</p>	<p>Indikator Dispensasi SPM Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat untuk periode yang berakhir pada 29 Desember 2023 adalah sebesar 5% dengan artian memenuhi seluruh target bobot indikator Dispensasi SPM yang telah ditetapkan. Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat telah senantiasa berupaya untuk memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana, menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran, dan menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukkan pencairan anggaran pada akhir tahun.</p>

Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran terdiri dari 1 indikator :

<p>Capaian Output</p>	<p>Indikator Capaian Output Kanwil Kemenkumham Barat untuk periode yang berakhir pada 29 Desember 2023 adalah sebesar 25%. Untuk mempertahankan capaian ini, Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat telah berupaya untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi antara unit pengelola kegiatan dengan
------------------------------	---

	<p>unit pelaporan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap output yang dikelola. • Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas dan capaian output serta memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran tidak melebihi ambang batas anomali (5% untuk output strategis, 20% untuk output lainnya). • Melakukan pengisian data capaian output secara akurat pada aplikasi SAS dan SAKTI secara disiplin setiap bulan.
--	--

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

A. *E-Performance* Kementerian Hukum dan HAM

Hasil Laporan Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat berdasarkan Aplikasi *E-Performance* sebagai berikut :

1. Divisi Administrasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (1 Tahun)	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,8	123%

2. Divisi Keimigrasian

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (1 Tahun)	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25	3,93	121%

		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13	3,73	119%
--	--	--	------	------	------

3. Divisi Pelayanan Hukum

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (1 Tahun)	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	Penurunan 0,7% dari Tahun 2022	Penurunan 14% dari Tahun 2022
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%	100%	116%
3.	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	133 Layanan	133 Layanan	100%
		2. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus	3 Lokus	300%
4.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan	2 Lokus	2 Lokus	100%

		Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah			
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	1 Laporan	100%
5.	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	1. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	100%	125%
		2. Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100%
6.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	100%	125%
7.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	6 Orang	47 Orang	783%
8.	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%

9.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1.	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	93%	113%
		2.	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	91%	114%
		3.	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (indeks)	88 (indeks)	115%
		4.	Persentase desa / kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	100%	143%
		5.	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	33%	165%
10.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1.	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah	6 Instansi Pemerintah	150%
		2.	Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah	15 Instansi Pemerintah	500%

		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	14 Instansi Pemerintah	1400%
11.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100%

4. Divisi Pemasarakatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (1 Tahun)	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan pelayanan pemsarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan pemsarakatan di wilayah	82 (indeks)	84 (indeks)	102%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	99,93%	111%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	93%	103%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	117%	130%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	89%	127%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	97%	114%

		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	87%	102%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	75%	441%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	40%	129%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	89%	124%
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	100%	125%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%	100%	125%
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	77%	128%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	58%	105%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	66%	189%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	100%	125%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100%
		3. Persentase Anak yang	90%	99%	110%

		memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar			
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	97%	108%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	100%	118%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	100%	125%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana /Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%	100%	118%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	118%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	118%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%

Kendala / Permasalahan :

1. Terkait dengan capaian Indeks Layanan yang harus dicapai tidak semua unit eselon I memberikan instrument pengukurannya, sehingga Kantor Wilayah dalam mengukur akan berbeda-beda antara kantor wilayah yang satu dengan lainnya;

2. Masih terdapat kesalahan dalam penghitungan secara matematika terkait penghitungan realisasi berdasarkan rumus manual Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020-2024.
3. Agar lebih meningkatkan sistem keamanan jaringan Aplikasi *E-Performance* sehingga Aplikasi *E-Performance* tidak lagi mudah diretas oleh *hacker*.
4. Dari bulan juni tahun 2023 Aplikasi *E-Performance* pada Satuan Kerja sudah tidak bisa diakses dan hanya Kantor Wilayah saja yang bisa mengakses Aplikasi *E-Performance* menggunakan wifi dari PUSDATIN.
5. Terdapat kendala pada pengisian Aplikasi *E-Performance* khususnya pada akun Divisi Pelayanan Hukum Subbidang Kekayaan Intelektual nomor 4 1 indikator kinerja kegiatannya Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual tidak bisa menyimpan hasil inputan realisasi dan isian pada kolom keterangan.

B. Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM

Target Kinerja merupakan rencana atau strategi yang ditetapkan untuk melakukan percepatan pelaksanaan suatu kegiatan. Pada tanggal 28 Desember 2022 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023. Dengan diterbitkannya Kepmenkumham tersebut, diharapkan agar tugas pokok dan fungsi yang ada di Satuan Kerja masing-masing disesuaikan dengan yang terdapat dalam Target Kinerja yang telah ditetapkan.

Penginputan Aplikasi Monitoring Kemenkumham Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat sampai dengan tanggal per 05 Januari 2024 secara keseluruhan sudah terpenuhi.

1. Permasalahan/Kendala yang dihadapi

Secara keseluruhan Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM Sumatera Barat sudah diupload melalui Aplikasi Monitoring Kemenkumham. Namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dalam proses pengumpulan data dukung yaitu :

- Kurangnya sinergi untuk mempercepat proses pemenuhan data dukung;
- Keterlambatan operator UPT dalam mengumpulkan data dukung kepada Operator Teknis divisi;
- Kurangnya informasi terkait perubahan data dukung;
- Kurang telitinya para operator terhadap data dukung yang dipenuhi sehingga dalam penulisan laporan target kinerja belum sesuai dengan TNDE, dan belum dilengkapi dengan analisa.

Diperlukan kerjasama yang baik antara operator divisi dan operator UPT dalam pemenuhan Target Kinerja, serta menggunakan format laporan yang sama sehingga memiliki keseragaman. Selain itu, pentingnya memiliki rasa tanggung jawab baik operator maupun pejabat yang berwenang. Sehingga dapat tercapainya pemenuhan data dukung target kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan tepat waktu.

Divisi Pemasarakatan, sebagian memiliki keluhan yang sama yaitu belum dikirimkan format laporan dari Ditjen Pemasarakatan. Sehingga data yang ada belum bisa diserahkan ke bagian Program dan Pelaporan. Beberapa operator juga kurang memahami data dukung diminta Target Kinerja, karna ada beberapa operator merupakan operator baru.

C. *e-Monev* BAPPENAS

Aplikasi *e-Monev* BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian/Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi *e-Monev* juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga. Aplikasi *e-Monev* dapat di akses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penginputan pada satker Sekjen dukungan manajemen belum 100% dikarenakan adanya proses revisi dan adanya penambahan ABT.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2020 – 2024. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja tahun kedua atas pelaksanaan RPJMN 2020- 2024 dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2020-2024.

Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat telah melaksanakan capaian kinerjanya yang secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Dari hasil analisa pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, semua divisi bertanggung jawab dalam capaian kinerja masing-masing target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2023 dan Target Kinerja 2023. Hasil capaian Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Kinerja menunjukkan akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

B. SARAN

Berdasarkan beberapa hal diatas, maka perlu tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain :

1. Untuk mendapatkan data capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan pemantauan secara terstruktur mulai dari jajaran atas sampai jajaran bawah;

2. Membuat suatu sistem aplikasi berbasis teknologi informasi dan memaksimalkan sistem informasi yang telah ada untuk menginventarisasi pelaksanaan kinerja maupun kegiatan dilingkungan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat sehingga memudahkan dalam memonitor kegiatan yang dilaksanakan;
3. Meningkatkan Koordinasi antar Bidang atau Bagian di lingkungan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA Tahun 2023



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ramelan Suprihadi
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Haris Sukanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 5 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat


Haris Sukanto
NIP. 19660605 198911 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi


Ramelan Suprihadi
NIP. 19681209 199403 1001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	87,0 92,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB" 2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	94 % 94 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 17.496.194.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 17.496.194.000,-

Padang, 5 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat

Hani Sukamto
NIP. 19660505 198911 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi

Ramelan Suprihadi
NIP. 19681209 199403 1001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ramelan Suprihadi
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Padang, 5 Januari 2023

Kepala Divisi Administrasi

Ramelan Suprihadi
NIP. 19681209 199403 1001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ali Syeh Banna
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Sumatera Barat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Haris Sukanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 5 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat


Haris Sukanto
NIP. 19660605 198911 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasyarakatan
Sumatera Barat


Muhammad Ali Syeh Banna
NIP. 19671219 199203 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN SUMATERA BARAT DENGAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80 (Indeks)
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri dan berdayaguna 2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) 3. Persentase menurunnya residivis 4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	50,0 % 80,0 % 1,0 % 90,0 %
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80,0 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan 4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	85 (Nilai Indeks) 85 (Nilai Indeks) 85 (Nilai Indeks) 83 (Nilai Indeks)
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana 2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana 3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan 4. Indeks Pembinaan Khusus Anak 5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	56 (Nilai Indeks) 92,5 (Nilai Indeks) 60 (Nilai Indeks) 74 (Nilai Indeks) 80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Klien Pemasarakatan	6. Indeks Pelayanan Tahanan	80 (Nilai Indeks)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Keterbiban UPT Pemasarakatan	80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemsarakatan yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan pemsarakatan di wilayah	82 (Indeks)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	2. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		4. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikal memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	80%
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang diindikasikan sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 822.875.000

Padang, 5 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat


Haris Sukanto
NIP. 19660605 198911 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasyarakatan
Sumatera Barat


Muhammad Ali Syeh Banna
NIP. 19671219 199203 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ali Syeh Banna
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Sumatera Barat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Padang, 5 Januari 2023

Kepala Divisi Pemasyarakatan
Sumatera Barat


Muhammad Ali Syeh Banna
NIP. 196712191992031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novianto Sulastono
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Haris Sukanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 5 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat


Haris Sukanto
NIP. 19660605 198911 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian
Sumatera Barat


Novianto Sulastono
NIP. 19661101 199503 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN SUMATERA BARAT DENGAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.527.142.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.527.142.000,-

Padang, 5 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat



Haris Sukamto
NIP. 19660605 198911 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian
Sumatera Barat



Novianto Sulastono
NIP. 19661101 199503 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novianto Sulastono
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Padang, 5 Januari 2023

Kepala Divisi Keimigrasian
Sumatera Barat


Novianto Sulastono
NIP. 19661101 199503 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ruliana Pendah Harsiwi
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Haris Sukanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 5 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat


Haris Sukanto
NIP. 19660605 198911 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Sumatera Barat


Ruliana Pendah Harsiwi
NIP. 19700411 199903 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,25
2.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20 %
3.	Terperuhnya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (indeks)
4.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (indeks)
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70 %
		Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82 %
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80 %
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (indeks)
5.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	75 %
		Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	45 %

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang	88 %

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	tepat waktu dan berkepastian hukum	
2.	Terwujudnya Otoritas Pusat yang Efektif dan Tepat Sasaran	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	88 %
3.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,34 (indeks)
4.	Mewujudkan pemanfaatan rekomendasi hasil analisis kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	80 %
		Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	20 %
5.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang
		Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%
6.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	21%
		Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	15%
7.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.75 (indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	20%
		Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
		Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%
3.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	133 Layanan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
4.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan
5.	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku
6.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan.	6 Orang
8.	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
9.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (indeks)
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%
10.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah
		Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
11.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi

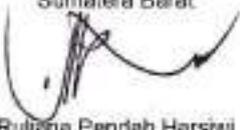
Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 6.228.535.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah)	Rp. 3.482.602.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.342.494.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 1.403.439.000,-
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 591.007.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 445.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 146.007.000,-
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 246.982.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 246.982.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 189.990.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 189.990.000,-

Padang, 5 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat


Haris Sukanto
NIP. 19660605 198911 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Sumatera Barat


Rulizna Pendah Harsiwi
NIP. 19700411 199903 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rulana Pendah Harsiwi
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Padang, 5 Januari 2023

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Sumatera Barat

Rulana Pendah Harsiwi
NIP. 19700411 199903 2 001

2. DOKUMENTASI















































BAGI PELAKU DEWASA

HOTEL THE ZHM PREMIERE, PADANG
SELASA, 14 FEBRUARI 2023

















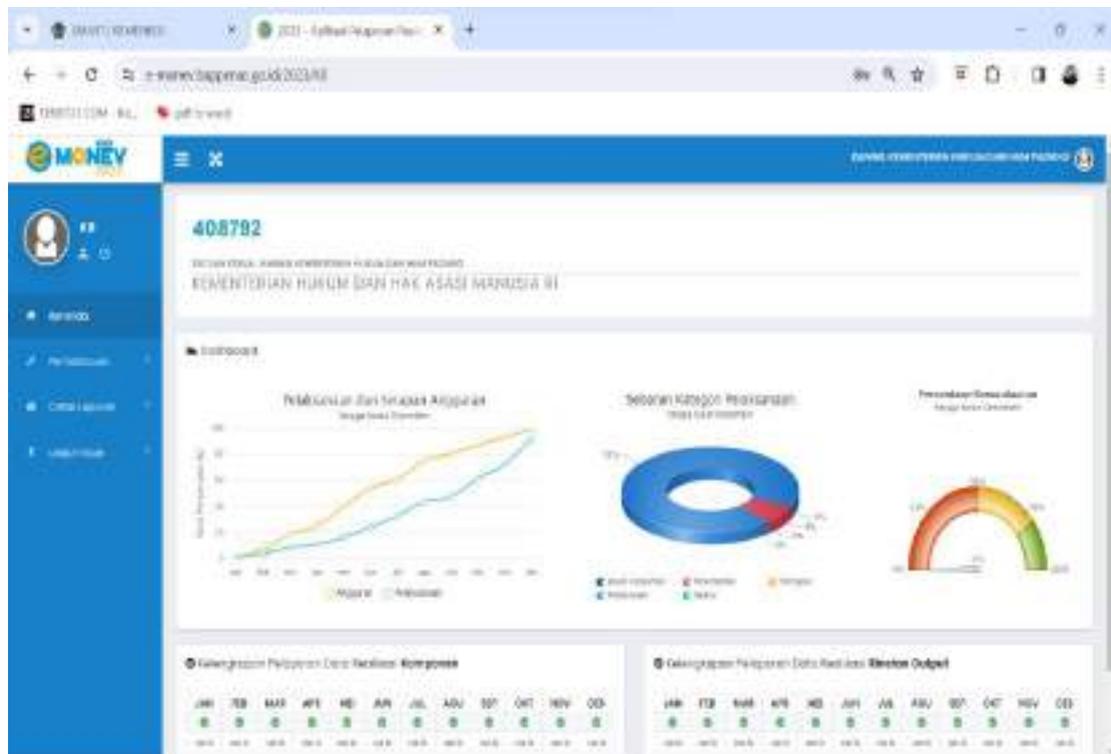
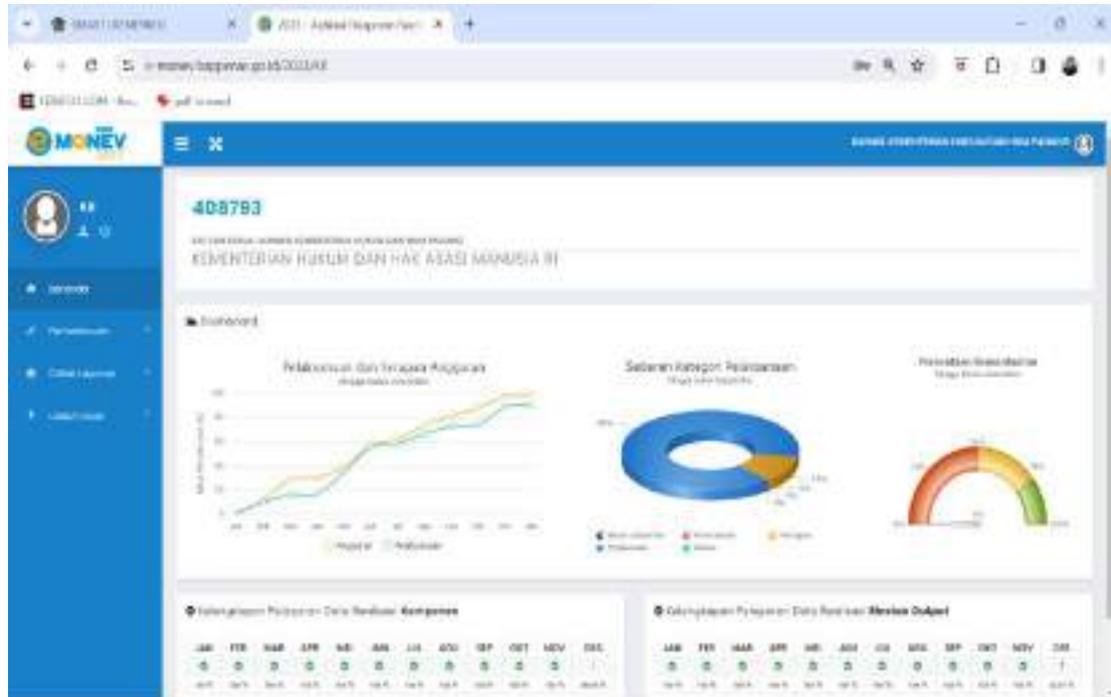


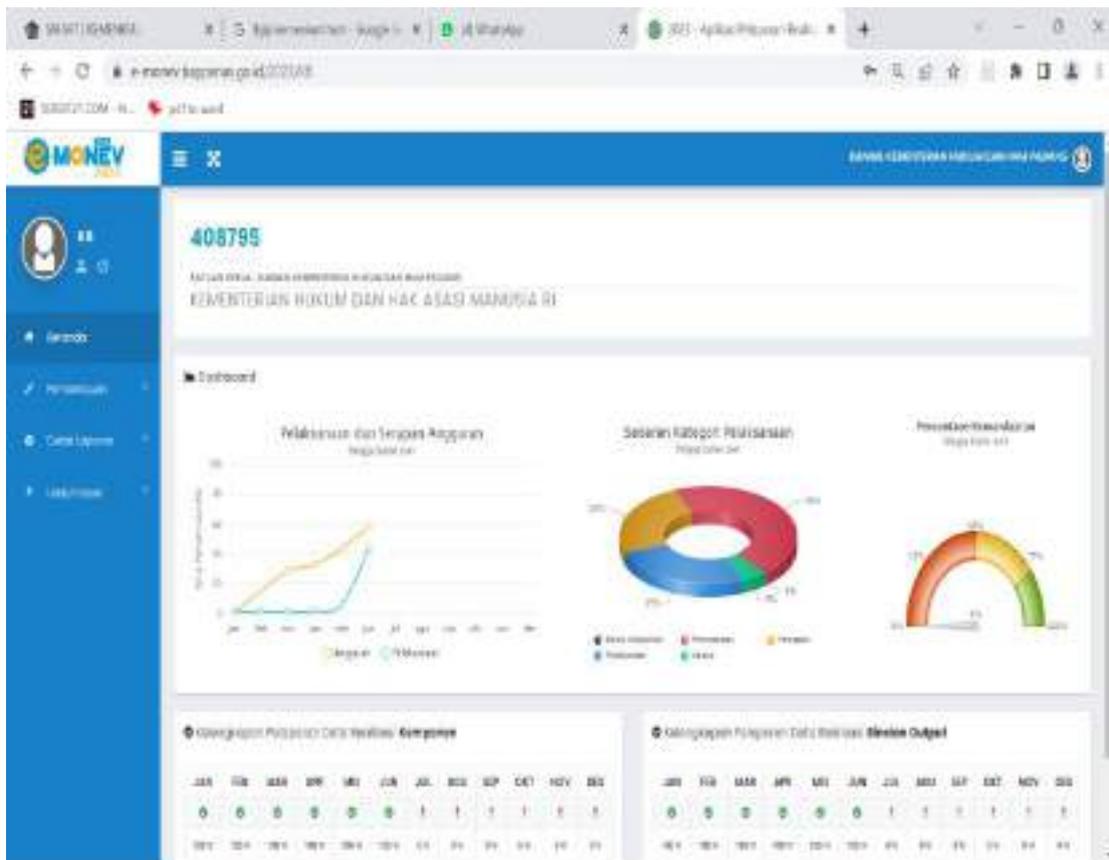
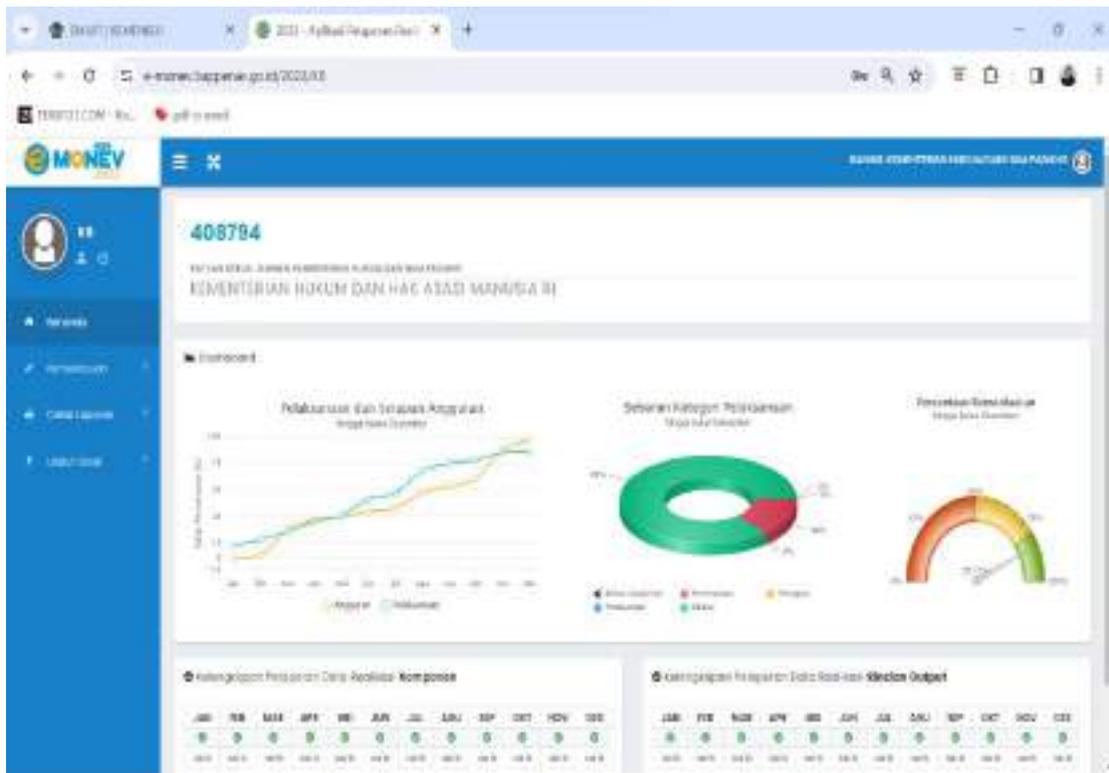


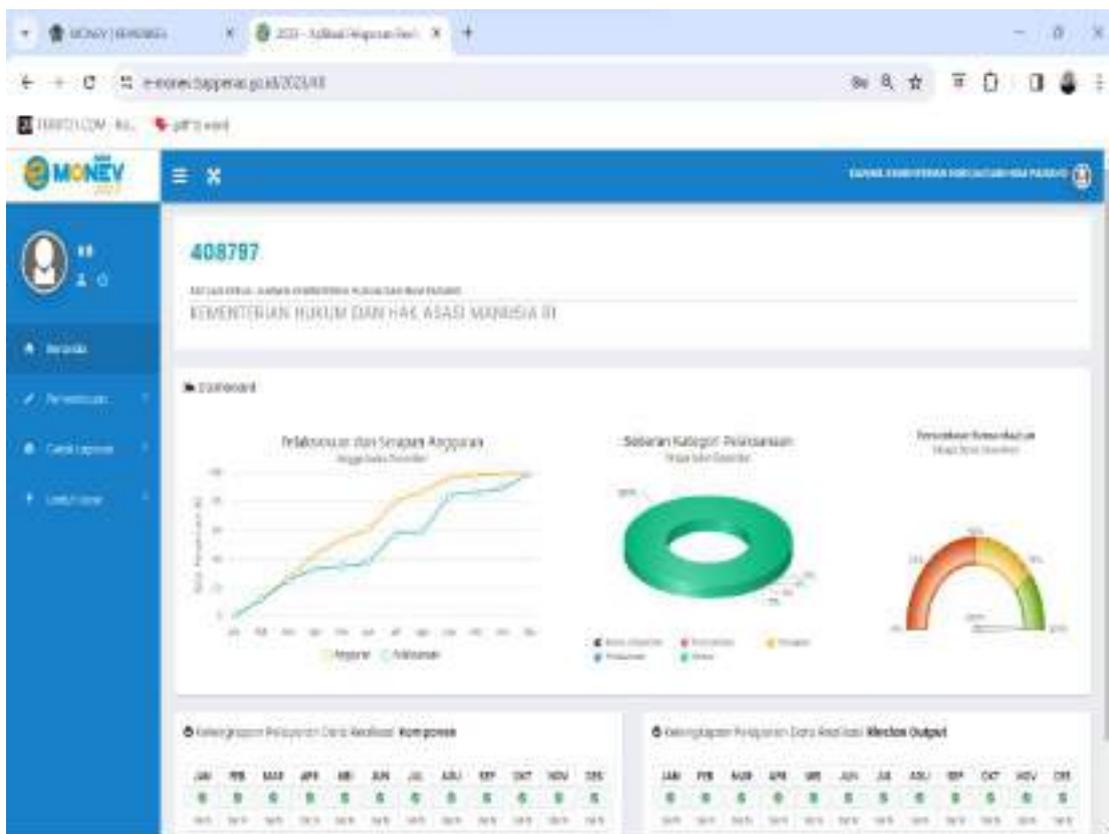
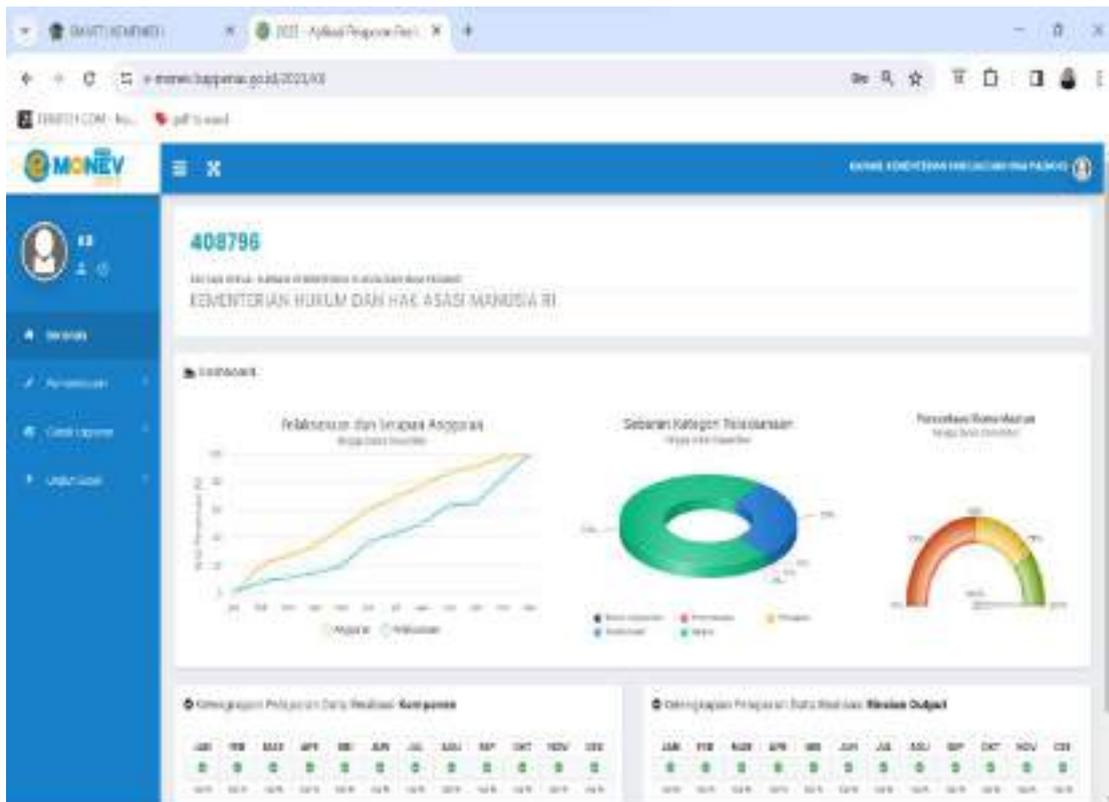


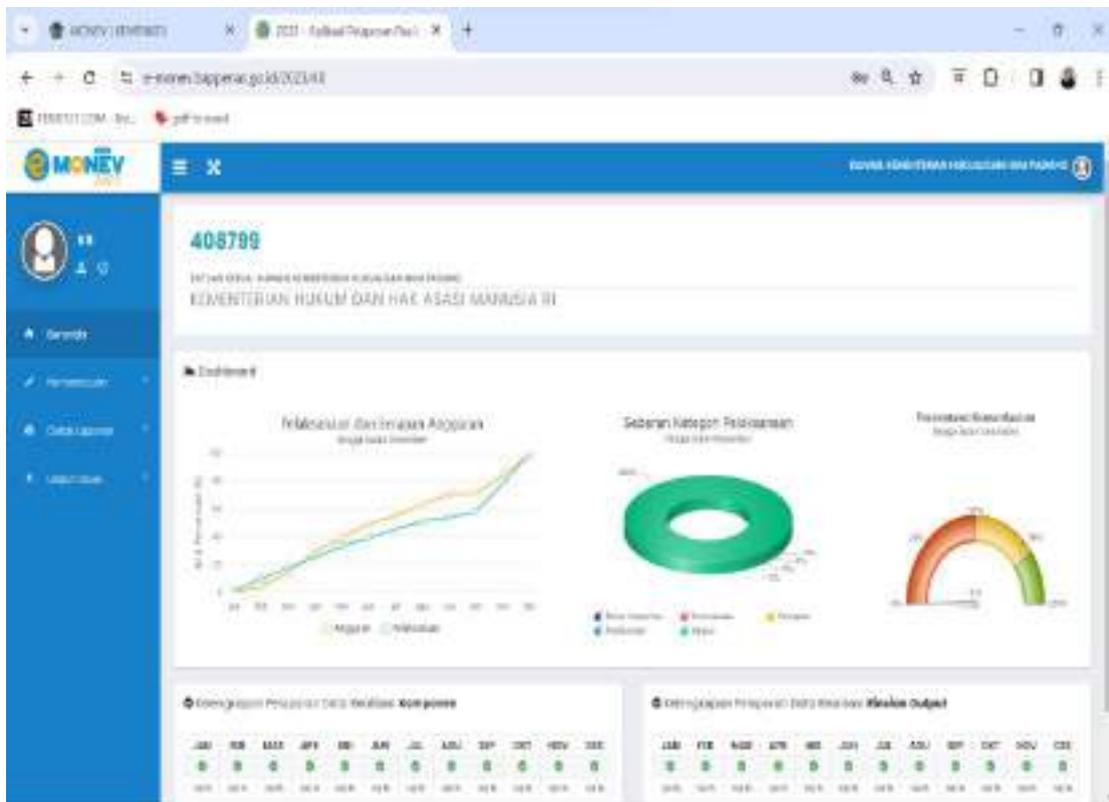
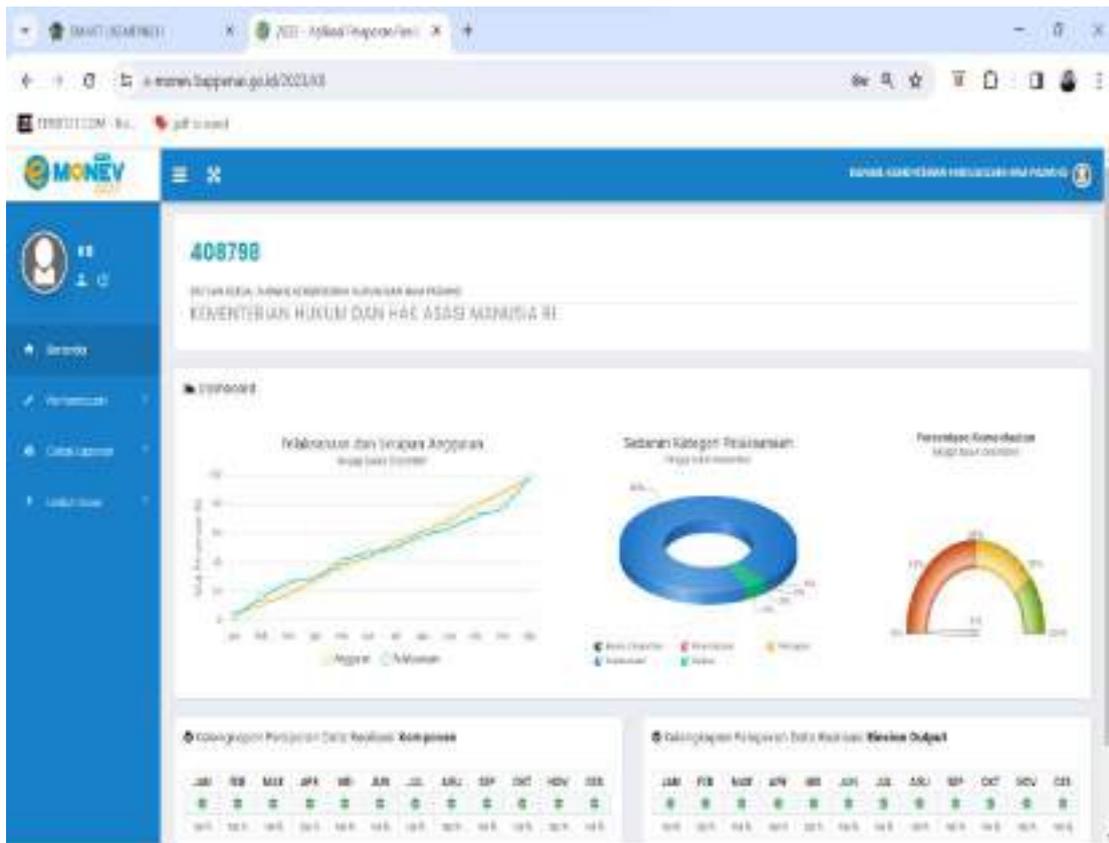
3. APLIKASI

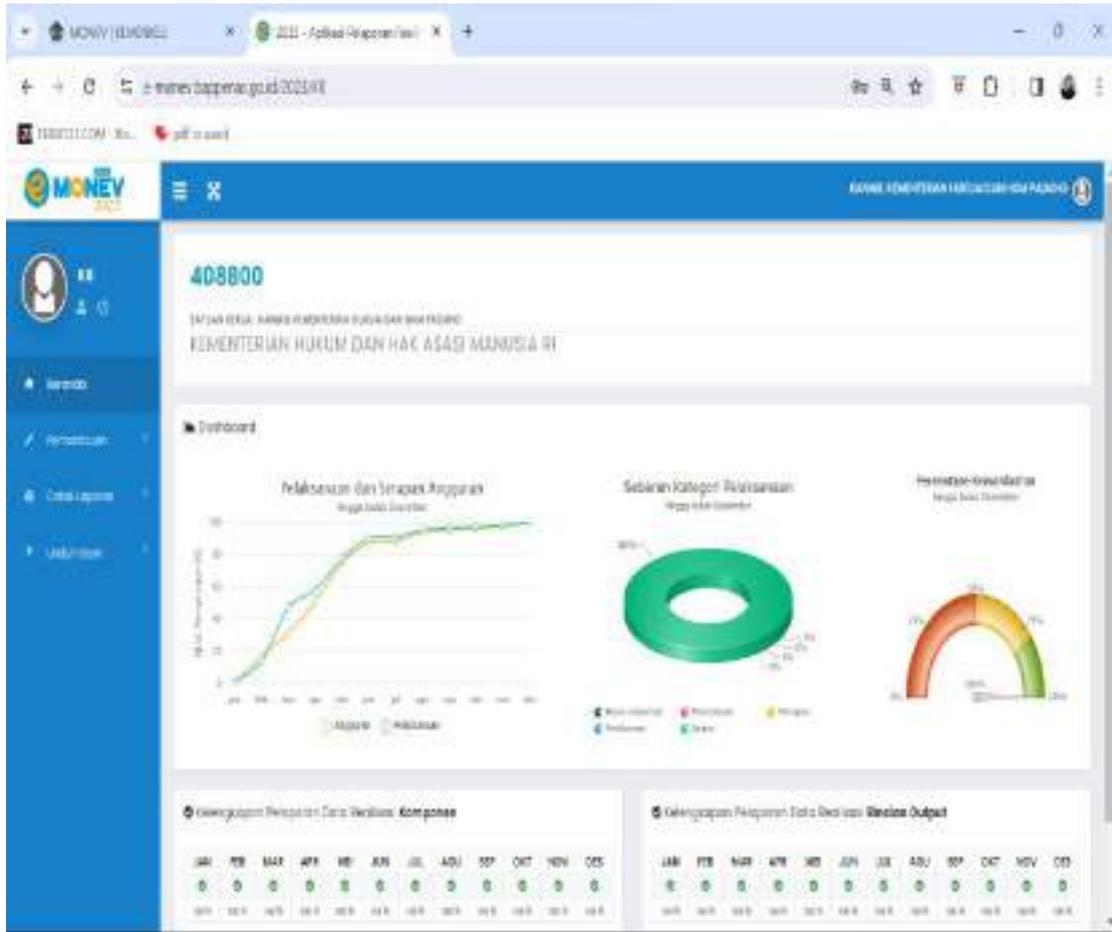
e-Money



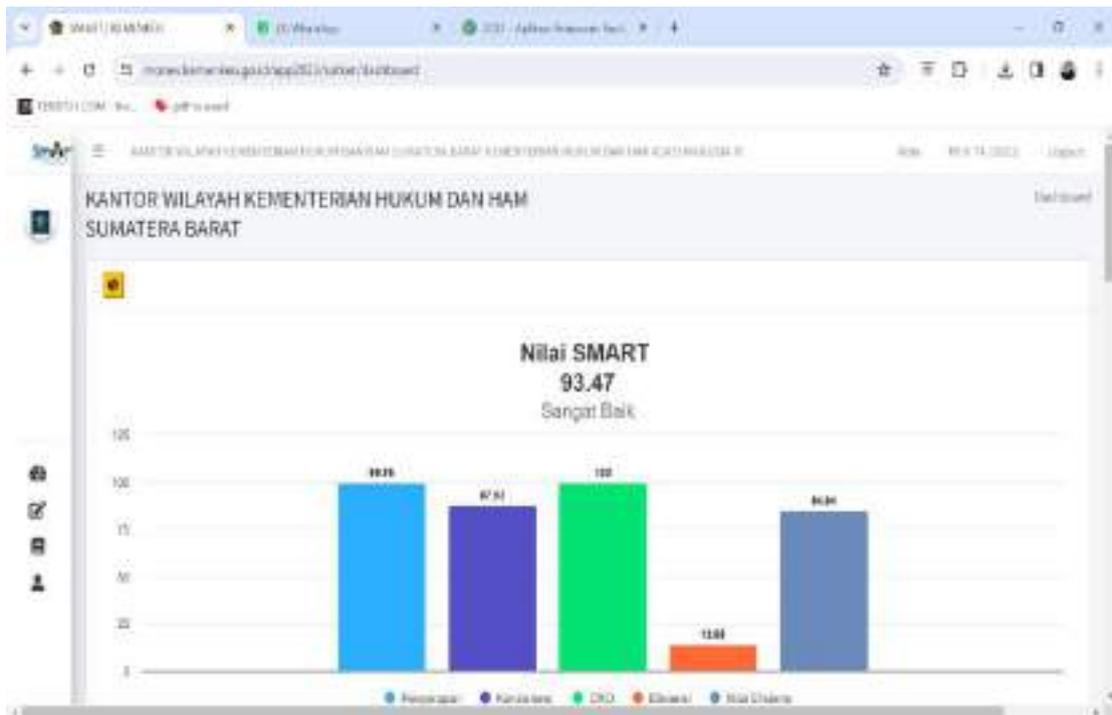


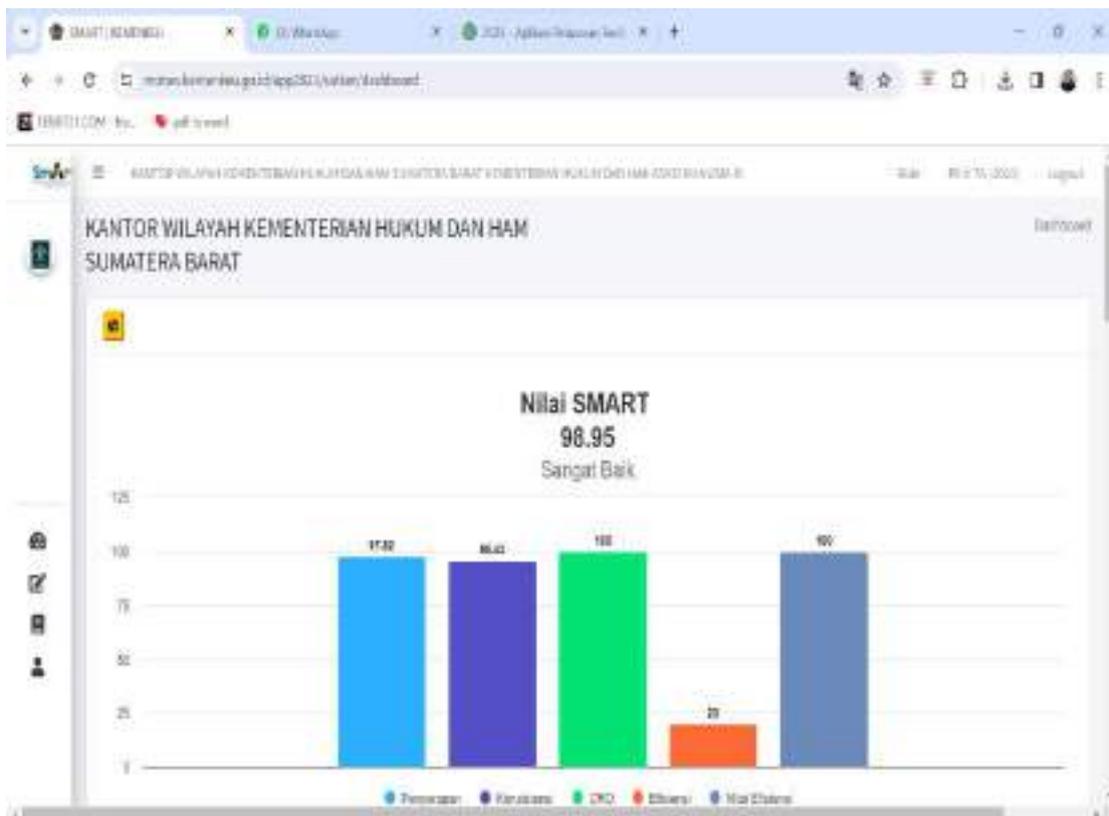
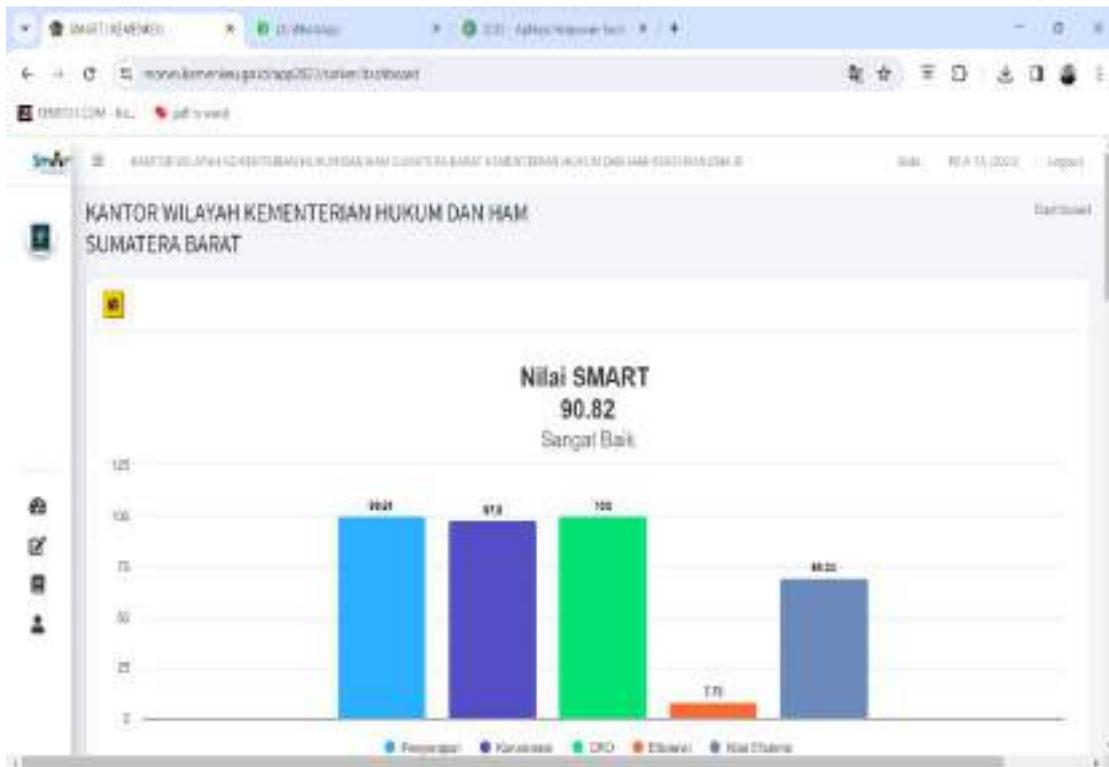


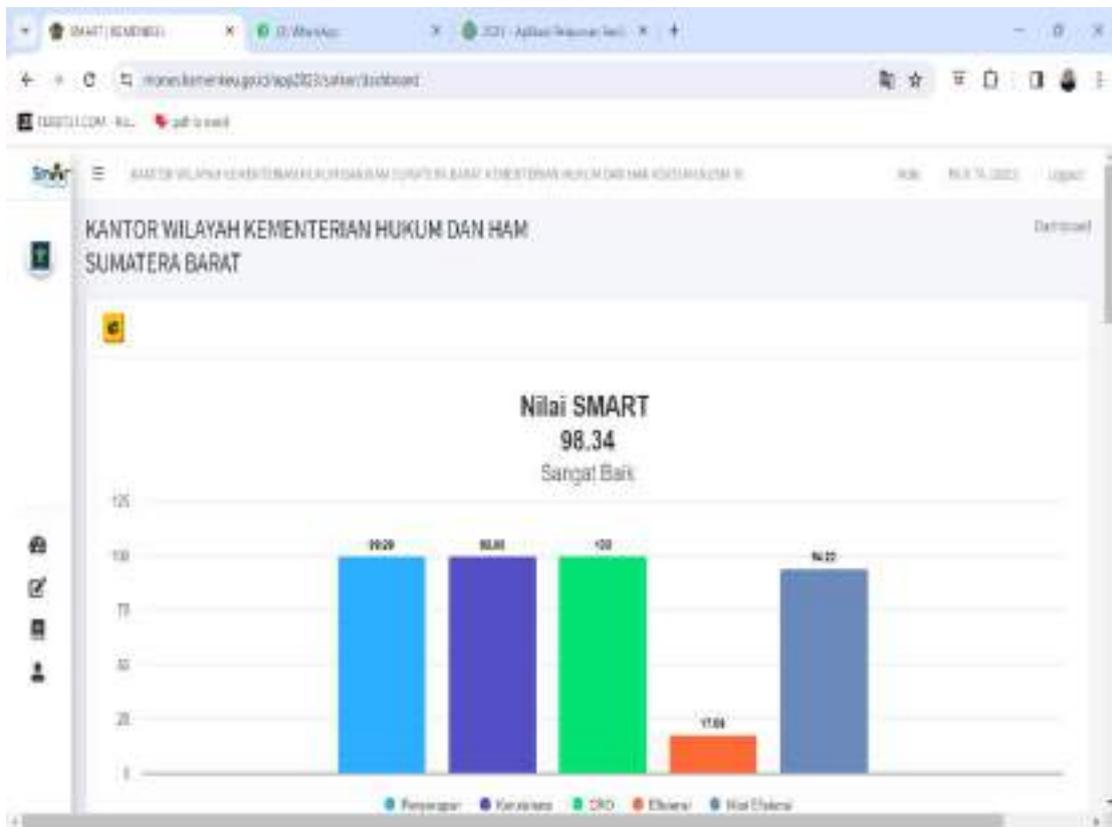
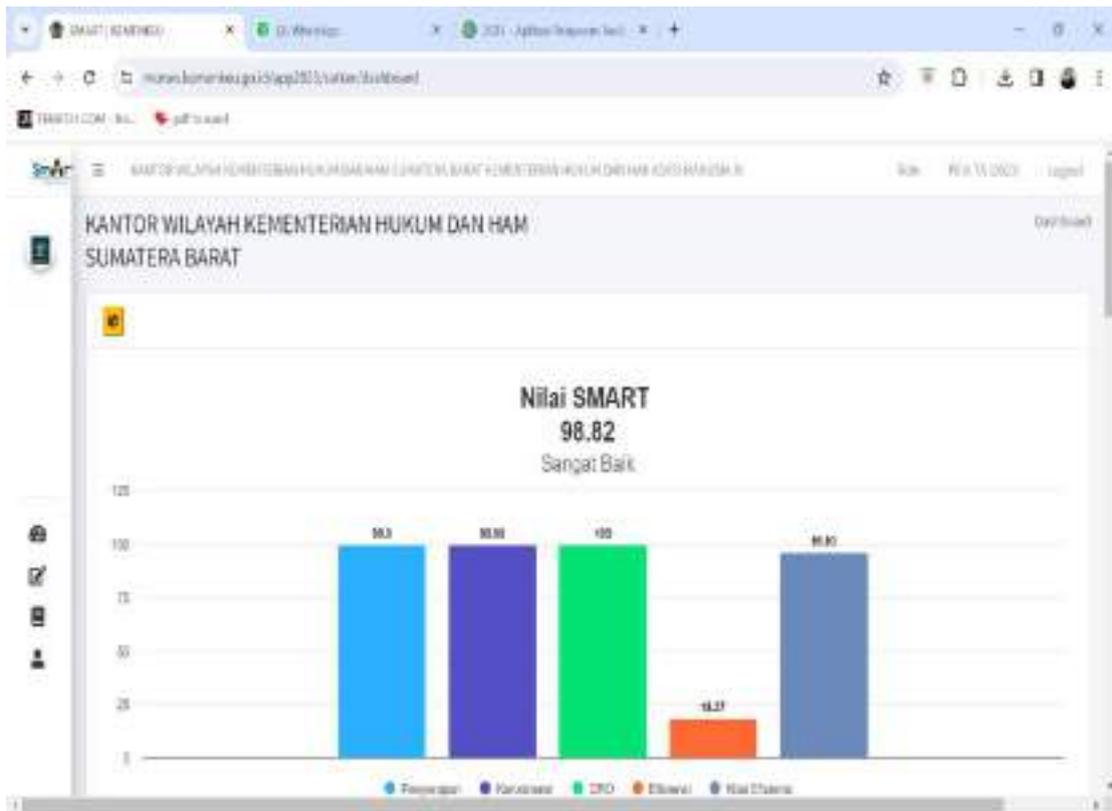


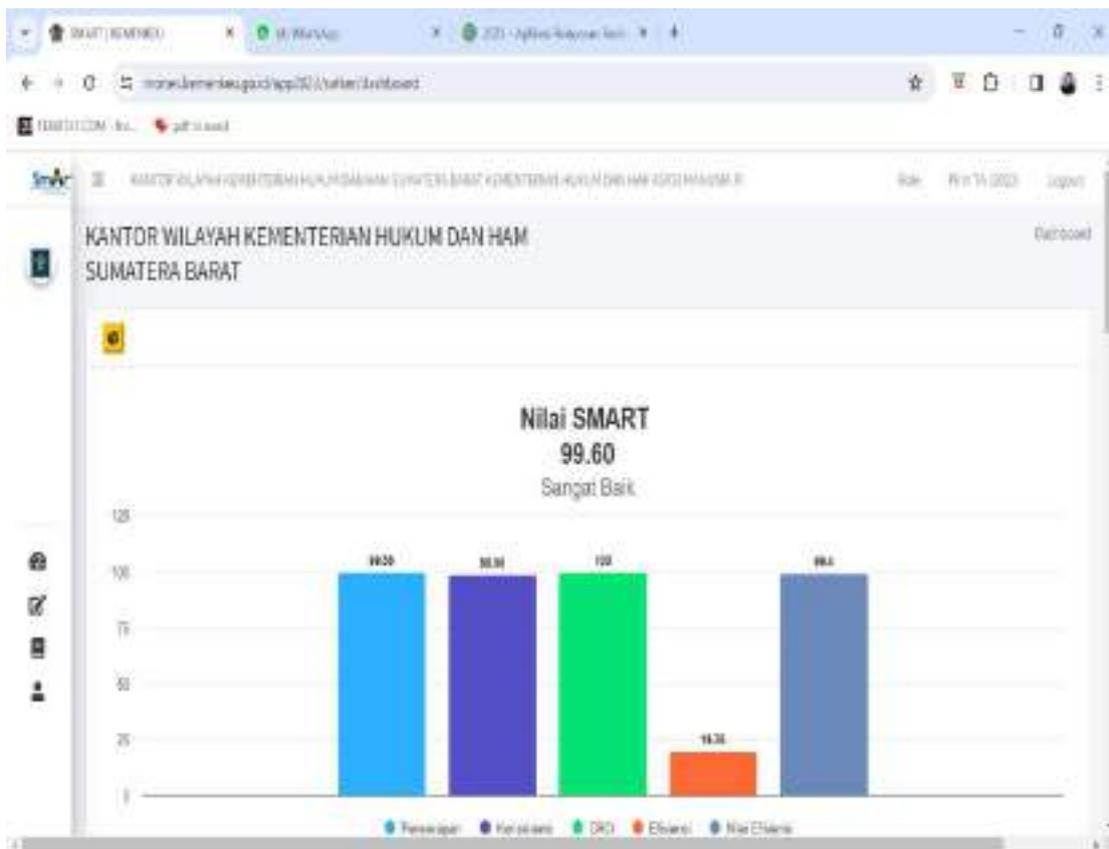
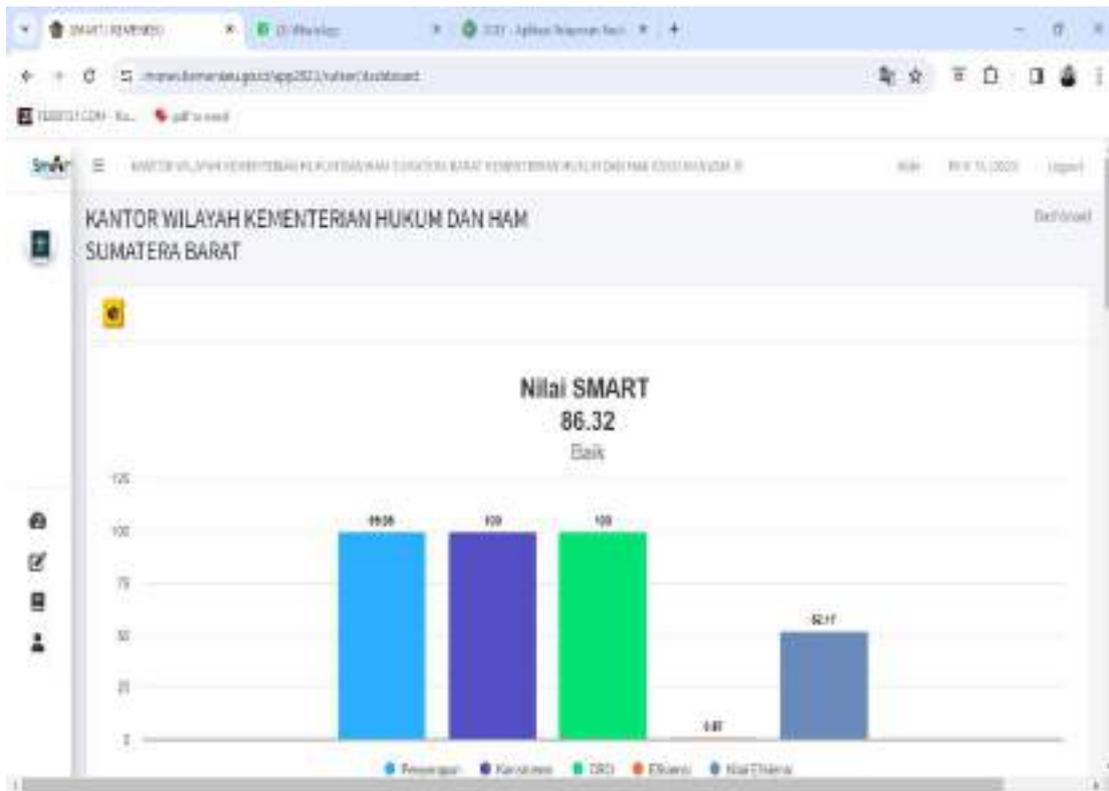


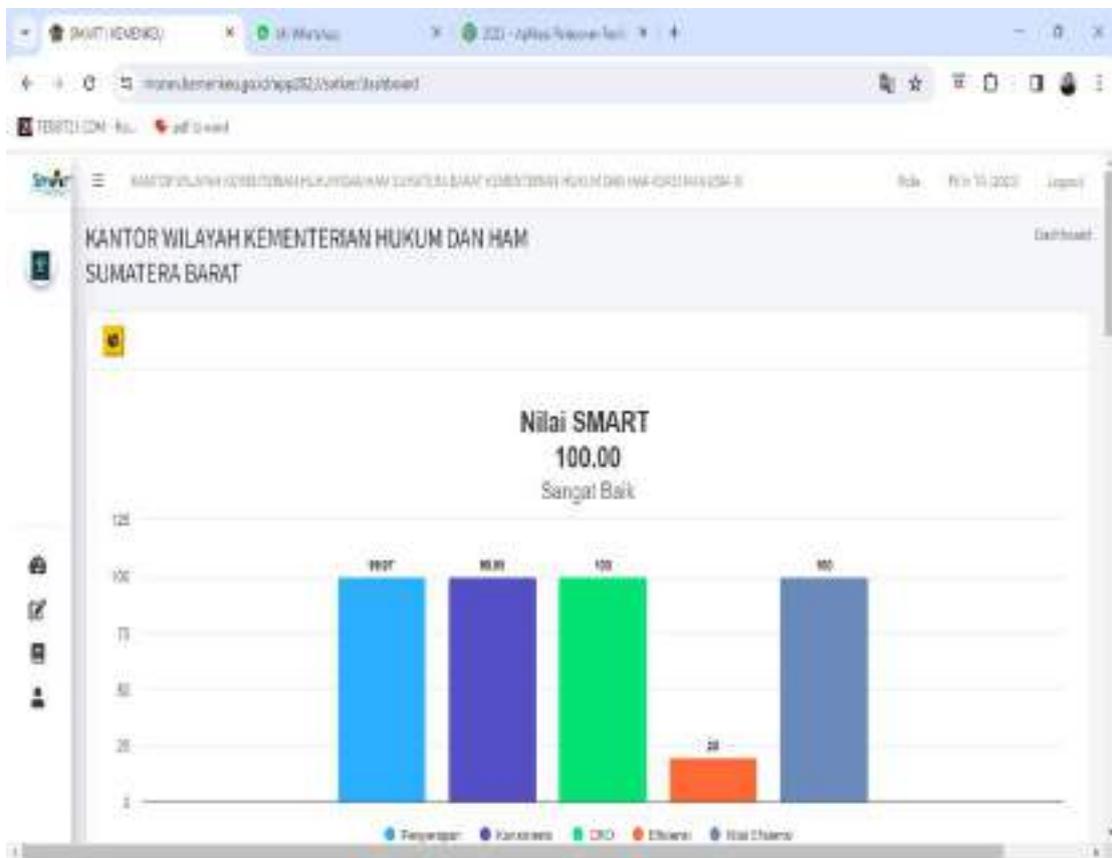
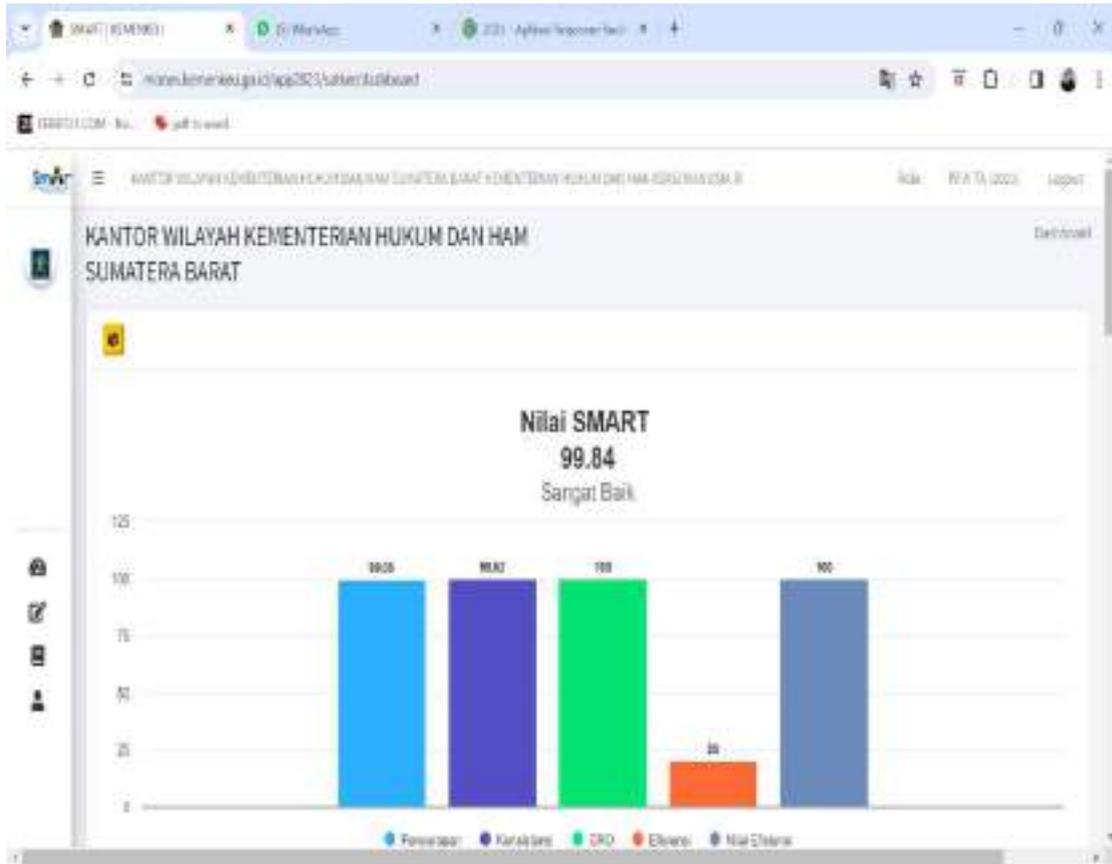
e-Smart











e-Performance

PERFORMANSI KEMENTERIAN RI 2022

INDUKSI	TINDAK	MATERI	REVISI
...
...
...
...

PERFORMANSI KEMENTERIAN RI 2022

INDUKSI	TINDAK	MATERI	REVISI
...
...
...
...
...

